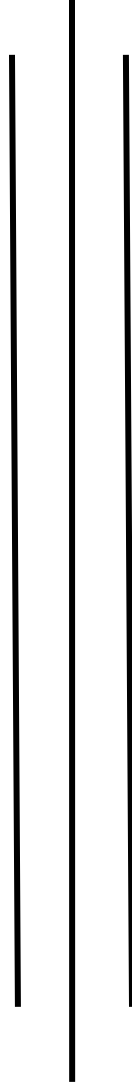


HINDU BALI



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Wisnu Press, Denpasar

2016

Daftar Isi Buku *Hindu Bali*

PENGANTAR PENERBIT	i
<i>Murdha Citta</i>	ii
Beberapa Pedoman Hidup Saya	iv
Daftar Isi	
BAGIAN I: APA ITU HINDU BALI?	
1. <i>Sraddha</i> Hindu Bali	3
2. Dasar Ajaran Hindu Bali	4
3. <i>Yadnya</i> Hindu Bali	4
4. Upacara Hindu Bali	4
5. Tempat Suci Hindu Bali	5
6. Sembah Hindu Bali	6
7. Hari Raya Hindu Bali	6
8. Penentuan Hari Baik Hindu Bali	6
9. Bahasa kepada Tuhan	7
10. Leluhur/ <i>Kawitan</i>	10
10.1 Kedudukan Leluhur/ <i>Kawitan</i> dalam Teologi Hindu Bali	11
10.2 Perjalanan Atman (Setelah Manusia Meninggal)	12
10.3 Hindu Tidak Mengenal Mengubur Jenazah	15
10.4 Arti dan Fungsi <i>Kajang</i> dan Tirta <i>Kawitan</i>	17
10.5 <i>Cuntaka</i>	19
10.6 Samsara (Punarbawa)	24
11. Upacara	25
11.1 Syarat-Syarat Keutamaan Upacara	27
11.2 Upacara dan Kesejahteraan	30
11.3 <i>Bhuta Yadnya</i>	31
11.4 <i>Bhuta ya, Dewa ya</i>	31
12. <i>Banten</i>	33
12.1 Pemahaman <i>Tattwa Bebantenan</i>	34
12.2 Ida Bhatara Menikmati Proses, Bukan Sekadar Puncak Upacara	35
12.3 Jual Beli <i>Banten</i>	36
13. Hindu Bali, Adat Bali, dan Budaya Bali	38
BAGIAN II: <i>SULINGGIH</i> HINDU BALI	
1. Sejarah Pendirian Parisada	43
2. Parisada Itu Lembaga <i>Sulinggih</i>	45
3. <i>Sulinggih</i> adalah Sang <i>Dwijati</i>	45
4. <i>Sulinggih</i> Tidak Sama dengan Pendeta Umumnya	47
5. <i>Tri Sadaka</i> dan <i>Sarwa Sadaka</i>	50

6. <i>Nuur</i> Lebih daripada Satu <i>Sulinggih</i>	51
---	----

BAGIAN III: MENJAWAB MASALAH AKTUAL

1. Masalah Pembacaan Doa	54
2. Mantram Menjadi Lagu Pop	56
3. Hindu Bali dan Alkohol	57
4. Bersih – Sehat – <i>Sukla</i>	59
5. <i>Krama Yadnya</i>	59
6. <i>Mula Keto</i>	60

TENTANG PENULIS	
-----------------------	--

MURDHA CITTA

OM Swastyastu.

OM Awighnamastu.

Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa tulisan, makalah, dan pemikiran-pemikiran lepas yang saya tulis sejak tahun 1994 lalu. Tema utama yang dibahas di dalamnya semua berkaitan dengan masalah-masalah aktual keagamaan Hindu Bali. Dalam penyusunannya menjadi buku yang utuh, saya sengaja membatasi hanya memilih tulisan-tulisan yang mengungkap hal-hal yang belum terungkap dan/atau terjawab dalam buku-buku lain. Penyajiannya pun diupayakan sedemikian rupa supaya ringkas, jelas, tandas, dan tuntas. Dengan pendekatan demikian saya berharap buku yang tersaji ini bisa menjadi salah satu sumber bacaan baru yang mudah-mudahan dapat memperlengkap pemahaman Pembaca Budiman perihal Hindu Bali yang aktual, menarik, efisien, dan efektif, sekaligus juga tidak tebal—mengingat kegemaran membaca masyarakat kita, termasuk penganut Hindu, masih sangat kurang.

Keinginan, bahkan tekad, untuk menulis buku terkait dengan Hindu Bali memang sudah lama terpendam dalam benak saya, namun karena kesibukan saya dalam berbagai urusan pekerjaan dan kegiatan rutin sehari-hari, keinginan itu pun belum dapat diwujudkan. Saya tidak sempat menyunting khusus hingga tuntas tulisan, makalah, dan juga pemikiran-pemikiran lepas tersebut. Supaya bisa terwujud berupa buku yang utuh, saya pun meminta bantuan kesediaan sahabat saya, I Ketut Sumarta, yang memang sudah *waged* sebagai penyunting—sekaligus sangat rajin mengingatkan dan menyemangati saya supaya menulis buku sebagai bukti *palaba* ‘warisan’ keintelektualan. Semangat dan kerjasama itu serta doa, restu, perkenan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida Batara-Batari, Leluhur-lah yang menjadikan buku ini tersaji di tangan Pembaca Budiman. Semoga berguna adanya.

Paling penting, saya berharap semoga buku ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi umat Hindu Bali. Lebih khusus lagi, buku ini saya tujukan kepada keluarga dan Keluarga Besar saya tercinta, Satrehing Ksatria Dalem Sri Aji Kresna Kepakistan—Dalem Segening Treh Ida Idewa Sumretha. Lebih khusus lagi untuk istri saya, Dra. Jro Putu Gustini, juga untuk putra-putri saya tercinta: Ida Idewa Ayu Lestari, Ida Idewa Gede Agung Lesmana, dan Ida Idewa Gede Mayun Sadhu Dharma, tiada terkecuali menantu-menantu saya: Pande Made Yasaputra dan Jero Novi Cempaka Dewi. Juga kepada cucu-cucu saya tercinta: Pande Putu Sari Satryani Yasaputri, Pande Made Satrya Yasaputra, Pande Komang Swary Satryani Yasaputri, Ida Dewa Agung Gede Bima Belawan, dan Ida Dewa Agung Gede Dhama Dhipa, dan segenap keturunan saya nantinya. Semoga mereka mampu menjadi orang-orang baik yang jauh lebih baik daripada saya.

Karena dirangkum dari berbagai tulisan, makalah, pemikiran-pemikiran lepas, tentu sajian ini sangat tidak lengkap dan masih banyak kekurangan. Meskipun demikian, saya tetap sangat berharap, semoga penyajian ini tidak mengandung informasi yang salah. Namun demikian, segala kritik, saran, dan masukan konstruktif tetap saya butuhkan.

Saya adalah manusia yang mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan dalam pikiran. Kelemahan dan kekurangan dalam perkataan. Kelemahan dan kekurangan dalam perbuatan. Namun, dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan itu pula saya terus berusaha dan berupaya untuk dapat me-*yadnya*-kan pikiran saya, me-*yadnya*-kan tutur kata, me-*yadnya*-kan perbuatan, dan segala yang ada pada diri saya. Saya harus melakukan segala yang menjadi *swadharma* 'kewajiban' saya.

Semua itu saya lakukan demi agama Hindu, demi kerukunan dan persatuan umat Hindu, dan demi Bali yang *Rajeg*.

Tan hana wang swasti annulus.

Segala kesalahan saya, mohon dimaafkan.

OM Ano Bhadrah Kratawo Yantu Wiswatah.

OM Shanti Shanti Shanti OM.

Hormat Saya,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

BEBERAPA *PATITIS* HIDUP SAYA

"KEBAHAGIAAN SAYA TIADA LAIN ADALAH APABILA SAYA BERHASIL MEMBAHAGIAKAN ORANG-ORANG YANG SAYA SAYANGI, APABILA SAYA MERASA DIBUTUHKAN, DIBUTUHKAN OLEH SEMAKIN BANYAK ORANG, APABILA DIBUTUHKAN OLEH KEHIDUPAN INI."

"KETIKA KITA HIDUP DENGAN IDEALISME, HIDUP DENGAN PRINSIP-PINSIP YANG KUAT, IDEALISME KEBENARAN SEKALIPUN, KITA MEMANG AKAN MERAHAI CINTA DAN KASIH SAYANG DARI JAUH LEBIH BANYAK ORANG, NAMUN TETAP TIDAK MUNGKIN MENGHINDAR DARI KEBENCIAN BEBERAPA ORANG."

"KEINGINAN SAYA ADALAH SELAGI HIDUP DIBUTUHKAN, DICINTAI, DISAYANGI OLEH JAUH LEBIH BANYAK ORANG, SETELAH MENINGGALKAN DUNIA INI, SERING DIKENANG OLEH JAUH LEBIH BANYAK ORANG...."

"SAYA BERTEKAD UNTUK MENJADI ORANG BAIK, NAMUN TIDAK PERNAH PUNYA KEINGININAN UNTUK MENJADI TERBAIK. KEINGINAN SAYA SEMOGA:
SEBANYAK-BANYAKNYA ORANG MENJADI LEBIH BAIK DARI SAYA.
SEBANYAK-BANYAKNYA ORANG LEBIH SEJAHTERA DARI SAYA.
SEBANYAK-BANYAKNYA ORANG LEBIH SEHAT DARI SAYA.
SEBANYAK-BANYAKNYA ORANG LEBIH CERDAS DARIPADA SAYA.
SEBANYAK-BANYAKNYA ORANG LEBIH BIJAK DARIPADA SAYA.
SEBANYAK-BANYAKNYA ORANG LEBIH BAHAGIA DARI SAYA.
SAYA TIDAK INGIN UNTUK MENJADI JUARA DALAM HAL APA PUN...."

"APA PUN KATA ORANG TENTANG HIDUP DAN KEHIDUPAN INI SAYA SELALU BERSYUKUR, MENIKMATI, DAN SANGAT BERTERIMAKASIH UNTUK HIDUP DAN KEHIDUPAN INI.... SAYA TIADA PERNAH MENGELUHKAN APALAGI MENYESALI HIDUP DAN KEHIDUPAN INI...."

"SAYA SELALU BERUSAHA DAN BEKERJA, KARENA ITU ADALAH KEWAJIBAN SAYA YANG UTAMA.... MENYEMBAH DAN BERDOA JUGA ADALAH KEWAJIBAN SAYA NAMUN SAYA TIDAK MERASA PUNYA HAK, KECUALI BERUSAHA SEDANGKAN HASIL DARI SETIAP USAHA SAYA BUKANLAH HAK SAYA.... SEGALA HASIL USAHA, HASIL SETIAP KERJA ITU ADALAH ANUGERAH DARI HYANG WIDHI WASA."

BAGIAN I: APA ITU HINDU BALI?

1. *Sraddha* Hindu Bali
2. Dasar Ajaran Hindu Bali
3. *Yadnya* Hindu Bali
4. Upacara Hindu Bali
5. Tempat Suci Hindu Bali
6. Sembah Hindu Bali
7. Hari Raya Hindu Bali
8. Penentuan Hari Baik Hindu Bali
9. Bahasa kepada Tuhan
10. Leluhur/*Kawitan*
 - 10.1 Kedudukan Leluhur/*Kawitan* dalam Teologi Hindu Bali
 - 10.2 Perjalanan Atman (Setelah Manusia Meninggal)
 - 10.3 Hindu Tidak Mengetahui Mengubur Jenazah
 - 10.4 Arti dan Fungsi *Kajang* dan Tirta *Kawitan*
 - 10.5 *Cuntaka*
 - 10.6 Samsara (Punarbawa)
11. Upacara
 - 11.1 Syarat-Syarat Keutamaan Upacara
 - 11.2 Upacara dan Kesejahteraan
 - 11.3 *Bhuta Yadnya*
 - 11.4 *Bhuta ya, Dewa ya*
12. *Banten*
 - 12.1 Pemahaman *Tattwa Bebanenan*
 - 12.2 Ida Bhatara Menikmati Proses, Bukan Sekadar Puncak Upacara
 - 12.3 Jual Beli *Banten*
13. Hindu Bali, Adat Bali, dan Budaya Bali

BAGIAN I: APA ITU HINDU BALI?

Mengapa istilah atau nama *Hindu Bali* perlu dipergunakan kembali oleh para pemeluknya?

Ada dua alasan mendasar, mengapa pertanyaan ini perlu mendapat penjelasan yang tuntas. *Pertama*, ada sebaran isu yang “memprovokasi” Hindu di Indonesia bahwa penganut Hindu Bali (selain Hindu Kaharingan) supaya “*back to Weda*”, kembali kepada ajaran Weda sebagai kitab suci Hindu. Isu ini telah memvonis bahwa Hindu Bali itu seolah-olah tidak berdasarkan Weda. Karena divonis seolah-olah tidak berdasarkan Weda, maka perlu dijelaskan dan ditegaskan kembali bahwa seluruh ajaran *tatwa* (filsafat, hakikat Ketuhanan), etika (susila), dan upacara yang dianut oleh Hindu Bali ini bersumber dari kitab suci Weda.

Kedua, mengingat belakangan ini mulai dikembangkan lagi sekte-sekte Hindu lain yang berasal dari India ke Indonesia, termasuk coba dikembangkan pula di Bali. Guna mencegah terjadinya kekaburan, bahkan kekacauan *tatwa* yang menjadi landasan *srada* (keyakinan), kesimpangsiuran etika (susila), terlebih-lebih tempat ibadah dan upacara *yadnya*, maka dipandang sangat perlu identitas Hindu Bali ini dimunculkan kembali. Dahulu, semasa Mpu Kuturan (awal abad ke-11) sampai kira-kira pertengahan dasawarsa 1990-an identitas Hindu maupun Hindu Bali itu sama saja, karena memang hanya ada satu macam Hindu di Indonesia, lebih-lebih lagi di Bali.

Penataan Hindu Bali secara terlembaga, terstruktur, dan tersistem kiranya bisa dicatat mulai pada abad ke-10. Saat itu Bali Pulina sebagai satu kerajaan yang otonom dipimpin oleh Raja Udayana. Pada saat kepemimpinan Raja Udayana inilah kehidupan beragama di Bali ditata secara melembaga, terstruktur, dan tersistem sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat keluarga.

Sebelum masa pemerintahan Raja Udayana, kehidupan keagamaan di Bali dicatat dalam manuskrip-manuskrip mirip dengan suasana keagamaan di India yang terdiri dari sekte-sekte. Tercatat ada paling sedikit sembilan sekte utama berkembang di Bali, masing-masing: Sekte Bhairawa, Sekte Boddha Sogata, Sekte Brahma, Sekte Ganapati, Sekte Pasupati, Sekte Waisnawa, Sekte Rsi, Sekte Sora, dan Sekte Siwa Sidhanta.

Disebut-sebut dengan adanya sembilan sekte tersebut menyebabkan suasana keagamaan di Bali menjadi tidak harmonis, kacau, sehingga sangat berpengaruh terhadap ke-*rajeg*-an Bali pada masa itu. Oleh Raja Udayana lantas didatangkanlah seorang *sulinggih* bernama Mpu Kuturan dari Jawa ke Bali. Mpu Kuturan diangkat menjadi Penasihat Raja, salah satu tugasnya adalah membenahi kehidupan keagamaan yang kacau tersebut.

Atas prakarsa Mpu Kuturan sebagai Senapati Kuturan dalam *pakiran-kiran i jro makabehan* (Majelis Permusyawaratan Kerajaan pada masa Kerajaan Bali Kuno) kesembilan sekte tersebut kemudian diundang mengadakan *pasamuhan* (setingkat musyawarah besar) di

Badahulu, Gianyar. Lokasi *pasamuhan* tersebut kemudian dinamakan Pasamuhan Tiga—didirikan Pura Kahyangan Jagat bernama Pura Pasamuhan Tiga.

Hasil terpenting dan monumental dari *pasamuhan* tersebut adalah bahwa kesembilan sekte Hindu di Bali tersebut melebur diri ke dalam tiga paham yang menyatu, yaitu Siwa, Boddha, dan Waisnawa. Tri Tunggal paham ini kemudian memuja Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa (Iswara) serta memuja pula seluruh Ista Dewata. Sejak penyatuan di Samuhan Tiga itulah disebut-sebut Bali menjadi damai dan sejahtera. Sejak itu pula pemujaan dalam upacara-upacara besar keagamaan Hindu di Bali di-*puput* oleh *sulinggih* dari tiga paham (*gegelaran*), yaitu *sulinggih* Siwa, *sulinggih* Boddha, dan *sulinggih* Bujangga Waisnawa. Secara tradisi di Bali ketiga *gegelaran sulinggih* ini dinamakan *Tri Sadaka*.

Dengan demikian kesembilan sekte yang melebur diri menjadi Tri Tunggal dengan *gegelaran sulinggih* yang dinamakan *Tri Sadaka* inilah kemudian menjadi ciri utama Hindu Bali. Pada era ini pula Bali kedatangan para *sulinggih* yang juga turut menyempurnakan praktik keagamaan Hindu Bali, antara lain, Mpu Geni Jaya, Mpu Sumeru, Mpu Ghana. Bahkan juga Mpu Baradah.

Tidak berhenti sampai di sini saja. Sekitar empat abad kemudian, semasa pemerintahan Raja Bali Dalem Watuenggong di Gelgel, datang pula Mpu Nirartha dari Jawa ke Bali. Kemudian Mpu Nirartha dikenal dengan nama Danghyang Nirartha atau Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh. Beliau selanjutnya memantapkan keberagaman Hindu Bali dari sisi Siwa Sidhanta. Adapun dalam hal upacara dan *bebantenan*-nya dimantapkan oleh Mpu Lutuk, sedangkan *indik* tata ke-*pamangku*-an dimantapkan oleh Mpu Sangkul Putih.

Dengan demikian Hindu Bali dapat diberikan batasan sebagai agama Hindu yang hidup dan berkembang di mana saja, yang inti ajarannya adalah Tantra Siwa Siddhanta yang dimantapkan oleh unsur Boddha dan Waisnawa yang menyembah Hyang Widhi beserta seluruh Ista Dewata, dan terdapat kekhususan sebagai ciri keagamaannya.

Apakah ciri utama keagamaan Hindu Bali itu? Guna mengenal Hindu Bali lebih jelas, terlebih dahulu perlu mengenal ciri-ciri pokok identitasnya, antara lain, sebagai berikut.

1. *Srada* (Keyakinan) Hindu Bali

Sradha (keyakinan) Hindu Bali didasari oleh *pancasrada*, yaitu:

- 1) *Sradha* tentang adanya Brahman dan Atman.
 - a. Brahman adalah Sang Hyang Widhi atau Tuhan Yang Mahaesa beserta seluruh Ista Dewata dan Avatara-Nya.
 - b. Atman adalah yang menjiwai segenap mahluk, yang berasal dari Brahman.
- 2) *Sradha* tentang adanya Kitab Suci dan para Rsi (tokoh suci).
- 3) *Sradha* tentang adanya Karmaphala sebagai hukum alam yang menggerakkan segenap mahluk hidup.
- 4) *Sradha* tentang adanya Samsara (Punarbhawa).
- 5) *Sradha* tentang adanya Moksa, yakni bersatunya Atman dengan Brahman.

2. Dasar Ajaran Hindu Bali

- 1). Weda
 - a). Weda Sruti: Catur Weda (*Rg, Yayur, Sama, dan Atharwa Weda*) dan *Bhagawadgita*.
 - b). Weda Smerti: *Manawa Dharma Sastra* dan *Sarasamusccaya*.
- 2). Upanisad-Upanisad.
- 3). Purana-Purana.
- 4). Itihasa: *Ramayana* dan *Mahabharata*.
- 5). Lontar-lontar Hindu Bali: banyak jumlahnya.

Upanisad, Purana, Itihasa, lontar-lontar Hindu Bali itu bersumber dan/atau merupakan penjabaran dari Weda. Buku *Upadesa* yang disusun pada tahun 1967 oleh tim tujuh (Dr. Ida Bagus Made Mantra; Ida Pedanda Gede Wayan Sidemen; Ida Bagus Gede Dosther, S.H; Drs. Ida Bagus Oka Punia Atmaja; Tjokorda Rai Sudharta, MA; Ida Pedanda Gede Putra Telaga; I Nyoman Mereta) merupakan identifikasi ajaran Hindu Bali yang bersumber dari Weda, Upanisad, Purana, Itihasa, dan Lontar-lontar Hindu Bali.

3. *Yadnya* Hindu Bali

Yadnya utama Hindu Bali adalah *pancayadnya*, yang meliputi:

- 1) *Dewa Yadnya*.
- 2) *Rsi Yadnya*.
- 3) *Pitra Yadnya*.
- 4) *Manusa Yadnya*.
- 5) *Bhuta Yadnya*.

4. Upacara Hindu Bali

Upacara keagamaan Hindu Bali meliputi:

1. Upacara *Dewa Yadnya*: upacara persembahan kepada Sang Hyang Widhi beserta segenap Ista Dewata-Nya.
2. Upacara *Rsi Yadnya*: upacara persembahan kepada orang-orang suci atau yang disucikan.
3. Upacara *Pitra Yadnya*: upacara persembahan kepada orangtua atau leluhur, *mendem* (mengubur jasad), ngaben, dan sebagainya.
4. Upacara *Manusa Yadnya*: upacara kepada sesama manusia, seperti upacara daur pertumbuhan hidup manusia: *kepus pungsed, abulan pitung dina, telu bulanan, otonan, menek kelih (ngaraja singa/ngaraja sewala), matatah/mapandes* (potong gigi), sampai pawiwahan.

5. Upacara *Bhuta Yadnya*: pengembalian kepada alam semesta, seperti *segehan*, *caru*, sampai *tawur*.

5. Tempat Suci Hindu Bali

Tempat suci Hindu Bali dinamakan Pura. Ada beberapa jenis pura, antara lain, sebagai berikut.

1. Pura Kahyangan:

a) Kahyangan Jagat:

- Sad/Sat Kahyangan: stana Istadewata (manifestasi) utama Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang meliputi empat arah utama (*dik*) masing-masing Pura Luhur Lempuyang (Iswara) di arah timur (*purwa*), Pura Andakasa (Brahma) di arah selatan (*daksina*), Pura Watukaru (Mahadewa) di arah barat, Pura Batur (Wisnu) di arah utara (*uttara*), serta empat pura lagi di arah silang/sudut (*widik*), masing-masing Pura Goa Lawah (Maheswara) di arah tenggara (*gneya*), Pura Luhur Uluwatu (Rudra) di arah barat daya (*nriti*), Pura Pucak Mangu (Sangkara) di arah barat laut (*wayabya*), dan Pura Besakih (Sambhu) di arah timur laut (*ersanya*). Adapun yang di titik pusat/tengah adalah Padma Tiga di Pura Penataran Agung Besakih.
- Dang Kahyangan, selain merupakan stana Ida Sang Hyang Widhi Wasa, juga untuk memuliakan dan menghormati jasa-jasa tokoh/orang suci yang membangun dan mengembangkan Hindu Bali, seperti Pura Silayukti di Teluk Padang, Pura Rambut Siwi di Jembrana, Pura Segara Rupek di tengah-tengah kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNNB), Gerokgak, Buleleng, dan lain-lainnya.
- Pura Jagatnata, yang dibangun di pusat-pusat wilayah ibukota, seperti Pura Jagatnatha yang ada di tengah Kota Denpasar, di tengah kota Negara, di tengah kota Singaraja, dan lain-lain.
- Kahyangan Jagat lainnya.

b) Kahyangan Desa, yang berupa Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) atau Kahyangan Desa lainnya.

c) Pura Prajapati sebagai *pangulun* (hulu atau kepala) *Setra*, sejenis kuburan.

d) Pura Swagina: Pura Ulun Suwi, Pura Melanting, Pura Segara.

2) Pura Keluarga:

a) Pura Padarman ataupun Pura Dadya.

b) Sanggah Kamulan untuk masing-masing pekarangan rumah.

Tempat suci Hindu Bali yang dinamakan pura ini, baik Pura Kahyangan maupun Pura Keluarga, masing-masing mempunyai ciri-ciri berupa *palinggih-palinggih* (bangunan suci) khusus yang mencirikan Hindu Bali.

6. Sembah Hindu Bali

Sembah Hindu Bali mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menyembah Tuhan atau Brahman atau Paramasiwa atau Sang Hyang Widhi, baik yang bersifat Tidak Berwujud (*Nirguna*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *impersonal God*) maupun yang bersifat Berwujud (*Saguna*, dalam bahasa Inggris diistilahkan *personal God*) atau Ista Dewata.
- 2) Menyembah para rsi atau orang suci yang berjasa mengajarkan kebenaran atau agama.
- 3) Menyembah *Pitara* atau Leluhur.
- 4) Menyembah orangtua (ayah dan ibu).
- 5) Hormat (bukan sembah) kepada para *bhuta*, kekuatan-kekuatan astral alam semesta.

7. Hari Raya Hindu Bali

Hari raya Hindu Bali ada dua jenis, yakni:

- 1) Hari raya yang berdasarkan bulan (*sasih*) bersiklus setahun sekali, seperti Hari Raya Nyepi dan Siwaratri.
- 2) Hari raya yang berdasarkan *pawukon* (pertemuan siklus lima harian [*pancawara*] dengan tujuh harian [*saptawara*]), jatuh setiap 210 hari (= enam bulan *pawukon*) sekali, seperti Hari Saraswati, Pagerwesi, Banyupinaruh, Galungan, Kuningan, Tumpek.

8. Penentuan Hari Baik

Penganut Hindu Bali sangat percaya pada penentuan hari baik (*subha dewasa*) dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan upacara *yadnya*. Penentuan hari baik ini disebut dengan istilah *ala ayuning dewasa*—secara harfiah berarti buruk (*ala*) dan baik (*ayu*) hari. Penentuan hari baik ini didasarkan pada gerak, perputaran, dan posisi benda-benda bersinar di angkasa atau planet-planet. Perhitungan *dewasa ayu* atau hari baik ini disebut perhitungan *Wariga Dewasa* yang perhitungannya dilihat dari *Wewaran*, *Wuku* (pekan), *Sasih* (Bulan), Pananggal (paruh gelap, menuju bulan gelap/Tilem) atau Panglong (paruh terang, menuju bulan terang/Purnama), dan *Dauh* (rentang waktu).

Penentuan *dewasa ayu* pawiwahan atau perkawinan, misalnya, diyakini menentukan apakah keluarga yang dibentuk kelak akan berbahagia, sengsara, sakit-sakitan, panjang umur, banyak rezeki, rukun, kuat, dan langgen, atau malah sebaliknya,

akan cepat bercerai, bahkan cepat menduda atau menjanda. Oleh karena itu penganut Hindu Bali tidak pernah main-main dengan *ala-ayuning dewasa*.

Demikian pula dengan upacara-upacara yadnya lainnya, seperti *ngaben/palebon*, *mamukur* yang termasuk *pitra yadnya*. Terlebih-lebih lagi yang berkaitan dengan upacara *dewa yadnya* maupun upacara *butha yadnya*. Bahkan dalam aktivitas kehidupan biasa, seperti membangun rumah, bercocok tanam, mulai berdagang, sampai memulai segala aktivitas, selalu berpedoman kepada *ala ayuning dewasa*.

Ala ayuning dewasa akan sangat berpengaruh pada hasil upacara *yadnya* yang dilaksanakan, apakah akan *siddha karya* (berhasil), *labda karya* (bermanfaat), atau malah *nirdon* (tidak mencapai tujuan, tidak berguna)? *Ala ayuning dewasa* ini juga akan sangat berpengaruh pada setiap hasil pekerjaan. *Padewasan* atau *ala ayuning dewasa*, bagi penganut Hindu Bali, memang diyakini sangat berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan.

9. Bahasa kepada Tuhan

Penganut Hindu Bali mendekatkan diri dan/atau memuja Sang Hyang Widhi dengan tiga macam bahasa, yaitu:

1. bahasa hati atau pikiran yang suci;
2. bahasa perbuatan; yang meliputi (a) perbuatan pada umumnya, dan (b) perbuatan upacara dengan *banten-banten* (sesajen) yang merupakan bahasa simbol-simbol.
3. bahasa kata-kata, yang mencakup mantra dan *puja saa*.

Di depan telah diuraikan bahwa salah satu kitab pegangan ajaran Hindu Bali adalah *Upadesa* yang disusun berdasarkan *Weda*, *Upanisad*, *Purana*, *Itihasa*, dan lontar-lontar Hindu Bali. Di sini tidak lagi dibahas apa itu *Weda*, *Upanisad*, *Purana*, *Itihasa*, atau lontar-lontar Bali, karena sudah cukup banyak buku yang membahas secara mendalam tentang dasar-dasar filsafat agama Hindu Bali tersebut.

Satu hal yang sering dianggap sebagai perbedaan—dan karenanya sering dipertanyakan—adalah bahwa Hindu Bali memuja leluhur (*kawitan*). Selain itu juga kerap dipertanyakan perihal upacara *yadnya* kepada *bhuta* (*bhuta yadnya*). Terkait dengan hal tersebut, berikut ini dikutipkan beberapa sloka *Weda* maupun *Itihasa* yang berhubungan dengan *yadnya* kepada leluhur (*kawitan*) maupun *bhuta yadnya*.

Rg Weda I.30.9

anu pratnasyaukaso
huve tuvipratim naram
yam te purvam pita huve

artinya:

Kami memuja-Mu, Hyang Widhi yang Cemerlang, yang menciptakan alam semesta dengan unsur abadinya; para guru dan leluhur kami juga kami puja dengan jalan yang sama.

Weda Smrti/Manawa Dharmasastra Bab III (*Tritiyo Dhyayah*)

Sloka 68:

*Panca suna grhasthasya
culli pesanyu paskarah
handani codakumbhaçca
badhyate yastu wahayan*

artinya :

Seorang kepala keluarga mempunyai lima tempat penyembelihan, yaitu tempat memasak, batu pengasah, sapu, lesung dan alunya, tempayan tempat air, yang dengan memakainya ia pun diikat oleh belenggu dosa.

Sloka 69:

*Tasam kramena sarwasam
niskrtyastham maharsibhiih
panca klrpta mahayajnah
pratyaham grhamedhinam*

artinya :

Untuk menebus dosa yang ditimbulkan oleh pemakaian kelima alat itulah para maharsi telah menggariskan supaya para kepala keluarga setiap hari melakukan *pancayadnya*.

Sloka 70:

*adhyapanam brahma yajnah
pitr yajnastu tarpanam,
homo daiwo balibhaurto
nryajno tithi pujanam*

artinya:

Mengajarkan dan belajar adalah yadnya bagi brahmana (*rsi yadnya*), upacara menghaturkan *tarpana* dan air adalah kurban untuk para leluhur (*pitra yadnya*), upacara dengan minyak susu adalah kurban bagi para dewa (*dewa yadnya*),

upacara *bali* adalah kurban untuk *bhuta* (*bhuta yadnya*), dan penerimaan tamu dengan ramah adalah kurban untuk manusia (*manusa yadnya*).

Sloka 81:

*Swadhyayanarcayet
samsimuhomair dewanyathawidhi
pitrn craddhaiçca nrrnam
nairbhutani balikarmana*

artinya :

Hendaknya ia sembahyang yang sesuai menurut peraturan kepada para Rsi dengan pengucapan Weda, kepada para Dewa dengan *homa*, kepada para leluhur dengan *craddha* karena keyakinan berhutang, kepada *bhuta* dengan upacara kurban (*balikarmana*).

Itihasa Kakawin Ramayana:

*Gunamanta Sang Dasaratha
wruh sira ring weda bhakti ring dewa
tar malupeng pitra puja
masih ta sireng swagotra kabeh*

artinya:

prestasi keberhasilan Sang Raja Dasaratha
Sri Baginda mahir tentang Weda, sujud bakti kepada Hyang Widhi
Tidak lupa pula beliau memuja (menyembah) leluhur
kasih sayang beliau kepada sanak keluarga semua.

Bhagawad Gita IX.25:

*Yanti dewa-wrata dewan
pitrn-yanti pitr-wratah
bhutani yanti bhutejya
yanti mad-yajino 'pi mam*

artinya:

Mereka yang memuja Dewa akan sampai kepada para Dewa, mereka yang menyembah leluhur (*pitra*) akan sampai kepada alam leluhur, yang berkorban kepada *bhuta* (roh alam) akan sampai ke roh alam, yang ber-*yadnya* kepada-Ku pasti akan sampai kepada-Ku.

Dari sloka-sloka tersebut tampak jelas bahwa para penganut Hindu Bali yang taat menjalankan *pancayadnya* akan sampai nantinya kepada roh alam (*bhuta*), sampai juga pada alam leluhur (*pitara/pitra*), alam para dewa (Ista Dewata), hingga sampai kepada alam tertinggi, yaitu Sang Hyang Widhi yang *Acintya*, atau Brahman/Paramasiwa. Ini berarti bahwa *atman* penganut Hindu Bali nantinya akan sampai di seluruh alam dan bebas pula ke seluruh alam.

10. Leluhur/*Kawitan*

Penganut Hindu Bali percaya dan yakin terhadap leluhur dan menyembah leluhur atau *kawitan*. Keyakinan terhadap leluhur atau *kawitan* inilah yang membedakan penganut Hindu Bali dengan penganut agama-agama lain, bahkan dengan beberapa aliran keagamaan Hindu yang tidak yakin dan tidak menyembah leluhur atau *kawitan*. Tidak heran bila penganut Hindu Bali tahu dengan jelas leluhur atau *kawitan*-nya hingga garis keturunan sejak 1500 tahun lampau, misalnya. Garis keturunan ini lazimnya ditulis dalam bentuk *babad* atau prasasti, atau silsilah keluarga yang pada umumnya disuratkan dalam lontar atau lembaran tembaga. Ada juga disuratkan dalam lembaran berbahan perak, bahkan lembaran emas.

Silsilah leluhur Hindu Bali ditulis dengan data sejarah yang jelas, sedangkan leluhur pada masa yang tidak diketahui dengan pasti lazimnya ditulis Leluhur tertinggi, yaitu Hyang Pasupati atau Tuhan Yang Maha Esa. Beliau-lah Kawitan seluruh umat manusia. Oleh karena itu pada hakikatnya Kawitan umat manusia pada awalnya adalah sama dan juga satu, yaitu Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Atas dasar ini maka sejatinyalah seluruh umat manusia ini bersaudara (*wasudewa khotum bhakam*).

Keuntungan bagi penganut Hindu Bali menyembah Leluhur adalah bahwa penganut Hindu Bali mengenal Leluhur-nya, senantiasa ingat kepada Leluhur-nya mulai dari ayah-ibu, kakek-nenek, cicit, buyut, dan seterusnya sampai akhirnya kepada Tuhan Yang Mahaesa (Hyang Pasupati). Selain menyembah: (1) Tuhan Yang Mahaesa yang disebut Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atau Sang Hyang Acyntia, atau Sang Hyang Paramasiwa; (2) Ista Dewata sebagai manifestasi Tuhan Yang Mahaesa yang berjumlah 108 Dewa; dan (3) para maharsi yang sudah *newata* (meninggal dunia); penganut Hindu Bali memang juga menyembah *pitara* atau *kawitan* atau para leluhur yang sudah *newata*. Selain itu penganut Hindu Bali juga menghormati *bhuta*.

Untuk apa penganut Hindu Bali mengenal dan memuja leluhur? Mengenal dan memuja leluhur dilakukan oleh penganut Hindu Bali dengan tujuan untuk:

1. memuja;
2. menyampaikan rasa syukur;
3. menyampaikan rasa terima kasih;
4. memohon perlindungan dan tuntunan; serta
5. memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan.

Begitulah, selain kepada Tuhan Yang Mahaesa, para Dewa (Ista Dewata atau Batara/Batari), dan maharsi, penganut Hindu Bali juga memuja, bersyukur, berterima kasih,

memohon perlindungan dan tuntunan, serta memohon pengampunan kepada para leluhur/*kawitan*. Penganut Hindu Bali yang baik dan benar akan merasa **sangat tidak beretika** dan sangat berdosa bila sampai tidak mengenal dan tidak menyembah yang menjadikan mereka ada, yang menyebabkan mereka lahir dan hidup sebagai manusia.

10.1 Kedudukan Leluhur/*Kawitan* dalam Teologi Hindu Bali

Kedudukan dan fungsi *kawitan* dalam teologi Hindu Bali dapat diilustrasikan seperti gambar berikut ini.



Di samping itu, bila dikaitkan dengan ajaran-ajaran Hindu yang lain, pada hakikatnya *bhuta*, *pitara*, *Ista Dewata*, atau *Brahman* itu adalah satu. Dari Brahman menjadi yang lain, dan yang lain itu pun dapat menyatu kembali ke Brahman yang merupakan sang *Atmatattwatma*, Inti-Hakikat (*Tattwa*) Segenap Atma. Perlu juga diingat bahwa *bhuta* dan Dewa adalah satu wujud dengan dua sifat yang berbeda, bahkan saling berlawanan, layaknya terang-gelap (*Dewa ya – Bhuta ya*). Para *kawitan* yang disembah di *palinggih* (bangunan suci) *Kamulan Rong Tiga* oleh penganut Hindu Bali merupakan para *kawitan* yang telah moksa, menyatu dengan Brahman dalam wujud Brahma-Wisnu-Iswara. Beliau adalah para *kawitan* yang sudah menyebut diri sebagai “*Aham Brahma asmi*”—Aku adalah Brahman.

Sampai di sini menjadi jelaslah bahwa sloka *Bhagawad Gita IX.25* yang telah dikutipkan tadi sangat sejalan dengan pandangan Hindu Bali. Selain itu masih banyak sloka-sloka dalam Weda, Upanisad, Purana, ataupun Itihasa yang berkaitan erat dengan bakti kepada para leluhur dan kewajiban memelihara (*nyomia*) alam (*bhuta hita*), baik dengan sarana *segehan* maupun *caru*, bahkan *tawur*. Khusus mengenai tata cara dan materi pe-*caru*-an, antara lain, diatur dalam lontar *Lebur Sangsa, Kala Tattwa, Bhama Kertih, Widhi Sastra, Yama Tattwa*.

10.2 Perjalanan Atman (Setelah Manusia Meninggal)

Bagaimana perjalanan atman manusia setelah meninggalkan raganya? Apakah langsung kembali kepada Brahman, atau justru tidak mudah menyatu kembali? Hindu Bali meyakini ada tahapan-tahapan perjalanan atman setelah seseorang meninggal dunia. Berikut ini uraian serba ringkas terkait dengan perjalanan atman dalam keyakinan Hindu Bali.

1. Setelah seseorang meninggal, bila sudah diaben atau di-*palebon*, dan juga bila segenap karmanya (*subha*/baik maupun *asubha*/tidak baik) memenuhi syarat, maka atmanya akan sampai di Pitara Loka (Alam Pitara). Di Pitara Loka, atman ini hidup sehat, tenang, damai, dan bahagia. Atman juga mampu selalu mendengar, mampu selalu melihat dari mana pun berada. Atman ini bergerak seperti angin, sekejap sampai di tujuan yang dikehendaki dalam wilayah Pitara Loka maupun Mercapada (alam manusia). Itu sebabnya dari Pitara Loka atman para *pitara* (leluhur) mampu selalu melihat kita (para keturunannya), selalu mendengarkan setiap kejadian, setiap kehidupan di alam fana (*mercapada*) ini. Namun demikian para *pitara* ini belumlah bersifat *wyapi wyapaka nirwikara* (belum mampu berada di mana-mana pada satu saat yang bersamaan). Sebaliknya, pada tahapan ini atman sang *pitara* baru mampu berada hanya di satu tempat dengan satu wujud pada satu saat. Adapun wujud badannya tetap seperti saat hidup di mercapada. Oleh karena para *pitara* selalu melihat dan mendengarkan kita (keturunannya), maka kalau kita ingin membahagiakan leluhur, sebagai wujud bakti kita, maka kita harus selalu hidup rukun, rahayu, damai, dan sejahtera.
2. Setelah didoakan oleh para *suputra* (keturunannya yang baik budi) dalam upacara *ngaroras*, atau *mamukur*, atau *baligya*, dan bila *subha-asubha* karmanya telah habis, ditambah dengan *tapa-brata-yoga-samadi* yang sudah dilaksanakan oleh para *pitara* di Pitara Loka, maka sang *pitara* pun akan sampai di Dewa Loka (Alam Dewa). Di Dewa Loka ini jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, daripada di Pitara Loka. Karena itulah sang *pitara* lantas disebut Dewa Pitara atau Batara Kawitan. Dalam tradisi Hindu Bali Dewa Pitara atau Batara Kawitan ini disembah melalui bangunan suci (palinggih) yang dinamakan *Gedong* atau *Pajenengan Rong Tiga* (Brahma, Wisnu, Iswara). Dalam alam Dewa ini sang Dewa Pitara atau Batara Kawitan pun sudah menjadi maha-melihat, maha-mendengar, dan bersifat *wyapi wyapaka* (mampu berada di mana-mana pada saat yang bersamaan).

3. Di Dewa Loka, di alam Brahma, Wisnu, Iswara, sang Dewa Pitara pun tak pernah henti melaksanakan tapa-brata-yoga-samadi. Sebagai hasil atas tapa-brata-yoga-samadi yang telah dilakukan, maka pada suatu saat yang telah ditentukan, sang Pitara yang telah menjadi Dewa Pitara atau Batara Kawitan ini pun akan mampu mencapai alam Tri Purusa, yaitu Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa. Pada tahapan ini Beliau lantas dipuja dan disembah melalui *palinggih* (bangunan suci) *Meru Tumpang Tiga*, yang menghadap ke barat di *Merajan* atau *Paibon* (Pura Dadya).
4. Selanjutnya di alam Tri Purusa pun sang Dewa Pitara yang telah menjadi Batara Kawitan terus-menerus melaksanakan tapa-brata-yoga-samadi, hingga akhirnya pada waktu yang telah ditentukan, sang Batara Kawitan ini sanggup mencapai alam Tuhan Yang Mahaesa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang *Acintya* (Tidak Terpikirkan). Di alam *Acintya* inilah sang Dewa Pitara telah mampu menyebut diri Beliau sebagai “*Brahma Aham*” atau “*Brahma Asmi*” yang berarti “Aku Adalah Tuhan”. Ini karena sang Dewa Pitara memang benar telah menjadi satu atau menyatu sepenuhnya dengan Tuhan Yang Mahaesa. Dalam tradisi Hindu Bali Tuhan Yang Mahaesa ini dipuja dan disembah melalui *palinggih* Padmasana ataupun Sanggaran Agung di Pura Dadya.
5. Tentu berbeda halnya dengan perjalanan atman yang jasad atau jenasahnya tetap dikubur. Atman yang jasad atau jenazahnya tetap dikubur ini terpaksa masih hidup di mercapada (alam fana manusia) ini. Lebih daripada itu sang atman pun selalu ingin berdekatan atau berada sangat dekat dengan badan kasarnya—walaupun sudah berupa tulang belulang. Dalam hal ini sang atman tidak mau berpisah dan/atau dipisahkan dengan badan kasarnya, kecuali badan kasar/jasad/jenazahnya yang berasal dari *pancamahabhuta* (*pertiwi/padat, apah/cair, teja/bersinar, bayu/berembus, dan akasa/ether*) itu telah kembali atau dikembalikan ke asalnya semula, yaitu *pancamahabhuta*. Bagaimana cara mengembalikan badan kasar/jasad/jenazah yang berasal dari *pancamahabhuta* ini ke *pancamahabhuta*? Penyatuan atau pengembalian *pancamahabhuta* ke *pancamahabhuta* itu dilakukan dengan cara dibakar sampai menjadi abu terlebih dahulu, dan setelah menjadi abu kemudian dihanyutkan atau ditebarkan ke air yang mengalir hingga akhirnya mencapai laut. Proses alamiah selanjutnya dengan sendirinya akan menguapkan air laut lewat sinar dan panas (*teja*) Matahari, sampai membaur kembali dengan angin (*bayu*), dan akhirnya kembali ke ether atau ruang-udara (*akasa*). Dengan demikian unsur-unsur *pancamahabhuta* pun kembali sepenuhnya ke asalnya. Proses pembakaran jasad/jenazah hingga menjadi abu itulah dinamakan upacara *Ngabuin*. Istilah *ngabuin* ini lantas diucapkan menjadi *Ngaben*. Dalam bahasa Bali *alus* (hormat) dinamakan *Palebuan*—yang kemudian diucapkan menjadi *Palebun*. Baik *ngabuin* (diucapkan *ngaben*) maupun *palebuan* (diucapkan *palebun*) berarti ‘penghancuran hingga menjadi abu’. Dengan demikian jasad/jenazah yang tidak dibakar hingga menjadi abu, atau dibiarkan tetap terkubur dalam tanah, tidaklah bisa disebut *Ngaben* atau *Palebun*. Kenapa? Karena dengan hanya mengubur jasad/jenazah itu berarti hanya yang berasal dari unsur *pertiwi* saja yang dikembalikan ke *pertiwi*, sedangkan unsur lainnya, seperti tulang belulang tetap

awet selamanya, bahkan sampai berjuta tahun sekalipun. Unsur jasmani inilah yang tetap memikat dan mengikat atman terus-menerus berada di mercapada untuk menjaga badan kasarnya. Hubungan keterpikatan dan keterikatan antara atman dengan badan kasar/jasad/jenazahnya yang tidak terpisahkan itu terjadi, karena diikat oleh cinta kasih yang melebihi ikatan apa pun. Ikatan cinta kasih atman dengan badan kasar/jasad/jenazahnya ini baru terjadi hanya sesudah jasad/jenazah itu kembali ke pancamahabhuta. Setelah itu barulah sang atman mau dan rela meneruskan perjalanan sebagaimana telah diceritakan sebelumnya (pada butir 1-4), sampai akhirnya sang atman *amor ring Acintya* (menyatu dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa yang Tiada Terpikirkan) atau *mulih ka sang Sangkan Paraning Dumadi* (kembali pulang menyatu dengan sang Mahaasal Hidup dan Kehidupan).

Paparan tadi menunjukkan bahwa atman yang jasadnya masih terkubur itu bukan berarti tidak mampu naik ke alam Pitara Loka, melainkan lebih karena tidak mau, tidak rela. Sepanjang jasadnya itu masih ada, maka sang atman akan senantiasa terpikat dan terikat harus selalu menjaga jasad itu di dekatnya. Itu berarti sang atman tetap hidup di mercapada ini, di alam manusia kita ini, hanya saja manusia biasa tidak mampu melihat, mendengar, ataupun meyetuh/meraba atman itu. Atman dengan jasad yang terkubur itu akan selalu ingin berada di kuburan (*setra*). Sekali-kali atman itu akan berjalan ke Pura Dalem atau Kahyangan Desa lainnya, atau ke Pura Dadya, atau ke rumahnya (yang dekat-dekat) karena dia belum mampu ringan seperti angin. Atman dalam kategori ini masih hanya mampu berjalan atau berlari, namun dia tetap selalu bisa mendengar kalau ada keluarganya memanggil, dan tetap selalu bisa melihat kalau ada keluarganya berkunjung ke *setra* atau sebaliknya, sang atman yang berkunjung ke rumah keluarganya (rumahnya sewaktu masih hidup). Perjalanan setelah kematian inilah yang membedakan kedudukan dan sifat sang atman antara jasadnya yang masih terkubur dengan yang sudah diaben atau di-*palebon*, dan juga yang sudah *ngaroras* atau *mamukur*.

Dari penjelasan perjalanan atman tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Atman yang jasadnya masih dikubur tidak mampu mencapai Pitara Loka.
2. Atman yang baru sampai di Pitra Loka tidak mampu bergerak langsung ke Dewa Loka (*Kamulan Rong Tiga*).
3. Atman yang baru sampai di Dewa Loka (*Kamulan Rong Tiga*) tidak mampu bergerak langsung ke Tri Purusa.
4. Atman yang baru sampai di Tri Purusa tidak mampu bergerak ke alam Tuhan Yang Mahaesa/Sang Hyang Widhi Wasa/Acintya (Padmasana).

Namun sebaliknya:

1. Atman yang sudah mencapai *linggih* Padmasana akan bebas bergerak ke mana saja, ke Tri Purusa, ke Tri Murti, ke Pitara Loka, maupun ke mercapada. Ini karena Beliau sudah bersifat Mahakuasa, *wyapi wyapaka nirwikara*.
2. Atman yang sudah di Tri Purusa akan bebas bergerak ke Tri Murti, ke Pitara Loka, dan ke mercapada.

3. Atman yang di Tri Murti akan bebas bergerak ke Pitara Loka, lalu ke mercapada, kapan pun Beliau berkehendak.
4. Atman yang di Pitara Loka akan bebas bergerak ke mercapada.

Demikian juga dapat dijabarkan karakter atman pada setiap loka. Pada saat atman berada di Pitara Loka, Beliau bisa berbahagia ataupun berduka saat menyaksikan keadaan di alam manusia (mercapada), lebih-lebih manakala menyaksikan keturunannya: entah dalam keadaan baik-baik, atau kacau-balau, rukun atau tidak rukun, di jalan dharma atau di jalan adharma. Itu berarti suka duka atau lara sang pitara akan sangat tergantung dharma *sesana* (perilaku) keturunannya. Untuk atman yang sudah berada di Dewa loka, lebih-lebih lagi sudah berada di Tri Purusa dan *linggih* Padmasana, maka hanya ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi yang dirasakan. Dia menjadi mahatahu, mahakuasa, maha melihat, maha mendengar, terbebas dari dua unsur *tri guna* (*rajas* dan *tamas*). Terbebas dari duka lara, terbebas pula dari ikatan cinta. Beliau berada dalam keadaan *sukham dukham samadiram* (suka duka sama saja).

Dari semua penjelasan tadi tergambar jelas bahwa alam Pitara Loka merupakan alam yang paling dekat dengan alam kehidupan manusia (mercapada). Pada saat leluhur atau *kawitan* kita berada di Pitara Loka, terlebih lagi manakala Beliau berkenan turun ke mercapada, bahkan ke rumah kita, atau mengunjungi kita, maka Beliau akan terpengaruh dengan unsure-unsur emosional, seperti bahagia, senang, sedih, duka, marah, sayang, tidak sayang, kasihan, tidak kasihan, dan seterusnya. Karena terpengaruh dengan emosional inilah maka akan terjadi interaksi antara *kawitan* dengan manusia atau dengan keturunannya, hanya saja manusia biasa tidak mampu merasakan secara langsung (*sakala*).

Karena ada kedekatan dengan ikatan emosional antara *kawitan* (ketika turun berkunjung ke alam manusia atau *mangjanma*) dengan keturunannya atau saudara-saudaranya yang hidup di mercapada, maka *kawitan* akan selalu menyaksikan perilaku dan mendengarkan kata-kata, bahkan pikiran, dan doa-doa kita. Maka kalau pikiran, perkataan, perbuatan, kita baik, dharma *sesana* kita baik, maka Beliau pun akan memberikan kita restu, membantu kita dan membantu memohon kepada Yang Mahakuasa untuk hidup dan kehidupan kita supaya rukun, rahayu, aman, berhasil dalam hidup, sejahtera dan bahagia. Beliau juga akan selalu berusaha menuntun kita. Kalau kita menjadi keturunan atau keluarganya yang baik, menjadi sang *suputra*, maka sang *kawitan* akan lebih sering turun mengunjungi kita, memberikan kita tuntunan doa dan restu, bahkan anugerah kepada kita. Bila kita baik dan dekat dengan *kawitan*, maka Tuhan Yang Mahakuasa, semua Ista Dewata, terutama Batara Kawitan akan selalu dekat dengan kita.

10.3 Hindu Tidak Mengetahui Mengubur Jenazah

Secara filosofis Hindu sebenarnya tidak mengetahui mengubur jenazah. Ini terkait dengan yang sudah dijelaskan pada butir 10.2 di depan, tentang peleburan jenazah hingga menjadi abu, dan perjalanan atman setelah meninggalkan badan kasar. Begitu juga telah dipaparkan perihal ketertarikan dan keterikatan atman dengan badan kasar. Hindu berpandangan bahwa badan kasar manusia ini terdiri atas lima unsur utama, dinamakan *pancamahabhuta*, masing-masing berupa

pertiwi (unsure padat), *apah* (unsur air/cair), *teja* (unsur sinar/panas/api), *bayu* (unsur angin/berembus), dan *akasa* (unsur udara/rongga/kekosongan/ruang/yang halus). Unsur-unsur badan kasar ini harus sesegera mungkin dikembalikan ke asalnya, yakni *pancamahabhuta* yang merupakan unsur-unsur alam.

Atman sebenarnya sangat tertarik dan terikat dengan badan, sehingga selalu ingin bersama badan, tidak terpisahkan. Karena sejak lahir menyatu bersama, menyatu selama hidup, itu menyebabkan cinta kasih dan keterikatan emosional atman yang luar biasa kepada badan. Namun sudah merupakan takdir sang Maha Pencipta Yang Mahakuasa, tak terelakkan lagi: badan kasar ini pun tidak berfungsi, sehingga atman tidak bisa lagi bersemayam di dalam badan kasar. Suatu saat sang atman pun mesti keluar dari badan kasar—meskipun dia tidak ingin berpisah, selalu ingin bersama, selalu ingin menjaga badan kasar ini. Ketertarikan dan keterikatan sang atman kepada badan kasar memang luar biasa, melebihi keterikatan antarsaudara kandung, suami-istri, ataupun orangtua dengan anak kandungnya. Sang atman baru terbebas dari ketertarikan dan keterikatan dengan badan kasar ini, apabila unsur-unsur badan kasar telah dikembalikan ke asalnya, yaitu ke *pancamahabhuta*: yang padat kembali ke *pertiwi*, yang cair kembali ke air (*apah*), yang panas kembali ke sinar (*teja*), yang berembus/napas kembali ke bayu, dan rongga-rongga kembali ke udara, ruang, yang halus (*akasa*). Setelah unsur-unsur badan kasar ini (*bhuwana alit*) kembali atau dikembalikan kepada asalnya masing-masing di alam semesta (*bhuwana agung*) ini, barulah sang atman mau melanjutkan perjalanannya menuju Pitara Loka, kemudian Dewa Loka, sampai akhirnya tiba di alam Tuhan Yang Mahaesa

Sesuai dengan yang disuratkan dalam pustaka-pustaka lontar Bali, seperti *Yama Purana Tattwa*, *Tattwa Loka Kretti*, *Aji Pelayon*, pengembalian unsur-unsur badan kasar ke asalnya (*pancamahabhuta*) yang paling baik, paling cepat, sekaligus paling utama adalah dengan menjadikan badan kasar ini sebagai abu (disebut *ngabuin*, kemudian diucapkan *ngaben*, atau dinamakan *palebuan* yang berarti penghancuran, dan kemudian diucapkan *palebon*). Proses penghancuran badan kasar/jenazah menjadi abu yang paling baik, paling cepat, sekaligus paling utama adalah dengan cara dibakar. Dengan dibakar berarti badan kasar dilebur dan dikembalikan oleh Sang Hyang Agni, sehingga tidak lagi berbentuk badan kasar/jenazah. Atas alasan itulah maka saya selalu menyarankan kepada *sameton* penganut Hindu Bali, terutama keluarga besar, agar tidak mengubur jenazah, sekalipun harus menunggu *dewasa ayu* (hari baik) untuk *ngaben* atau *palebon*. Paling tidak saya menyarankan supaya *makingsan di geni*—dibakar juga hingga menjadi abu, namun tanpa upacara *palebon*.

Meskipun secara filosofis Hindu tidak mengenal penguburan jenazah, namun dalam praktiknya tetap saja ada yang menguburkan jasad. Kenapa penganut Hindu Bali lantas mengenal pula penguburan jenazah? Hal ini kiranya bisa dikaji dari sudut pandang sosiologis dan antropologis. Kemungkinan terbesar adalah karena pada masa lampau sangat sulit mencari pengawet jenazah, tidak dikenal formalin, dan belum juga bisa mendapatkan es. Selain itu juga ada kemungkinan karena penganut Hindu Bali sangat yakin dengan *ala ayuning dewasa* (hari buruk dan baik) untuk pelaksanaan *ngaben/palebon*. Misalnya, saat-saat yang tidak baik untuk *ngaben/palebon*, antara lain, *wuku* dengan *ingkel* Wong, Was Panganten, *wewaran* Kala

Gotongan, Semut Sadulur, Pasah. Selain itu juga tidak baik *ngaben/palebun* saat Purwani, Tilem, Purnama, Kajeng Kliwon, Panglong Apisan, Panglong Kaping 8, Panunggal Kaping 8, dan lain sebagainya.

Karena pada masa lampau sulit mencari sarana atau bahan-bahan pengawet jenazah, sedangkan *dewasa ayu* untuk *ngaben/palebun* masih harus menunggu lama (lebih daripada 3 hari, misalnya), maka supaya jenazah tidak sampai busuk dan sangat berbau tidak sedap, akhirnya jenazah pun terpaksa dikubur terlebih dahulu untuk sementara. Setelah setahun hingga tidak lebih daripada lima tahun sejak dikubur, tulang-belulang jasad itu pun diangkat kembali dari liang kubur, kemudian diaben/di-*palebun*. Penguburan jasad/badan kasar, karena itu, dilakukan peenganut Hindu Bali untuk masa sementara saja. Bukan permanen.

Lantas, bagaimana bila lebih daripada lima tahun kerangka yang sudah dikubur itu belum juga digali dan dibakar, diaben/*palebun*? Pada kondisi demikian, sang atman pun telah lupa jalan kembali menuju ke asalnya, lupa pada *marga sanga* (sembilan jalan) untuk pulang ke Asal Mula. Ini menyebabkan sang atman selamanya luntang-lantung di mercapada, menjadi *bhuta cuil* (mahluk astral yang kotor) dan abadi ada di dunia fana ini. Dia pun menjadi lupa diri, linglung, gentayangan tidak karuan. Sungguh kasihan—dan sangat menyedihkan.

10. 4 Arti dan Fungsi *Kajang Kawitan* dan Tirta *Kawitan*

Upacara *ngaben/palebun* dalam praktik keagamaan Hindu Bali menggunakan begitu banyak *upakara* (peralatan), *banten* (sesajen), dan juga tirta (air suci). Beberapa *upakara* (peralatan) yang digunakan, antara lain: *pepaga, eteh-eteh pabersihan, pangulungan, lante, bandusa, tumpang salu, tatindih, wukur, pangrekaan, kajang, kereb sinom, angenan, deling/jemek, iber-iber, pangubes-ubesan* (berupa burung cenderawasih yang dinamakan *Manuk Dewata*), *bargawa/tah, gender, panuntunan, bade, patulungan, sekarura, cegceg, bale gumi (tatakan api), bale lanjut, jempana*.

Jenis *bebantenan* yang digunakan, antara lain: *banten Sanggar Surya, banten pamelaspas, banten ayaban, banten pabersihan dan prayascita, panjang ilang, bubuh pirata, nasi angkep, tetukon (tetukuan), pangawak, ajengan beblagan, banten pamerasan*, dan sebagainya. Demikian juga dengan kelengkapan tirta mesti lengkap, seperti: tirta *panglelukatan*, tirta *pabersihan*, tirta ning (diperoleh dengan memanah *toya ning*), tirta *pamanah*, tirta *panembak*, tirta *kawitan*, tirta kahyangan tiga, dan tirta *pangentas*.

Perihal sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai kelengkapan upakara dalam upacara *ngaben/palebun* telah banyak dikupas dalam berbagai buku yang patut dijadikan literatur. Dalam buku ini saya tidak akan mengulangi lagi pembahasan ini. Saya memandang perlu menjelaskan lebih khusus hanya perihal dua hal saja yang belum begitu dijelaskan ataupun kurang lengkap dijelaskan dalam buku-buku lain. Pertama, tentang makna dan fungsi *Kajang Kawitan*. Kedua, perihal Tirta *Kawitan*.

1. *Kajang Kawitan*

Kajang merupakan kain putih yang ditulisi aksara-aksara suci Bali, masing-masing: Pranama (aksara OM-kara), Dwiaksara (aksara ANG dan aksara AH), Triaksara (aksara ANG, UNG, dan MANG), serta Dasaksara (aksara: SANG, BANG, TANG, ANG, ING + NANG, MANG, SING, WANG, YANG). Keseluruhan aksara suci ini dinamakan Sadasaksara (16 aksara suci).

Kajang yang berupa kain putih itu merupakan “selimut” atau “kulit” bagi sang *layuan*. Adapun aksara-aksara tersebut merupakan aksara utama yang penuh arti kesucian dan ke-*siddhi*-an. Dengan demikian kajang dengan suratan 16 aksara suci itu bermakna sebagai doa-doa utama, yang akan turut menemani dan mengantar jenazah maupun sang atman kembali menuju asalnya masing-masing. Jenazah (*layuan*) kembali ke usnur pancamahabhuta alam, sedangkan atman kembali ke Parama Atma.

Kajang Kawitan lazimnya disuratkan oleh *pamangku* atau salah seorang keluarga yang sudah *mawinten pamangku*. Setelah selesai disuratkan, *kajang kawitan* ini kemudian *katunasang* (dimohonkan) ke-*siddhi*-an ke hadapan Batara Kawitan di Merajan atau Pura Dadya. Saat *pratisentana* (keturunan) *tangkil* (hadir) *nunas* (memohon) *Kajang Kawitan* di Merajan atau Pura Dadya itu, sesungguhnya sekaligus juga berarti *nuwur* Ida Batara-Batari *Kawitan* (Leluhur) *sami* (semua) supaya berkenan *tedun* (hadir) untuk *nuntun-nandanin* (menuntun) sang atma menuju alam Pitara Loka.

2. *Tirta Kawitan*

Dalam setiap upacara *ngaben/palebun* Hindu Bali yang lengkap, selain *Tirta Pangentas* yang dianggap paling penting sebagai *paican* (anugerah) Ida Batara melalui sang *sulinggih*, ada satu lagi tirta yang tidak kalah penting mesti ada. Tirta itu adalah *Tirta Kawitan*.

Tirta Kawitan ini berfungsi sebagai doa restu dari Ida Batara *Kawitan* (Leluhur) untuk menuju pelepasan. Saat *pratisentana* (keturunan) *tangkil* (hadir) memohon *Tirta Kawitan* di *Merajan* atau *Pura Dadya*, sesungguhnya itu sekaligus juga berarti *nuwur* (memohon mengundang) Ida Batara-Batari *Kawitan*, baik yang sudah di Pitara Loka, Dewa Loka, Tri Purusa, maupun yang sudah di Padmasana supaya berkenan *tedun* (turun, hadir) saat upacara *ngaben/palebun*.

Tujuan *nuwur* (memohon mengundang) Ida Batara-Batari *Kawitan tedun* (turun, hadir) saat upacara *ngaben/palebun* adalah supaya Ida Batara-Batari *Kawitan arsa ledang* (berkenan) *nuntun-nandanin* (menuntun) sang atma menuju Pitara Loka. Kalau sudah mendapat doa, restu, serta tuntunan Batara-Batari *Kawitan*, yang diwujudkan dalam bentuk *Kajang* dan *Tirta Kawitan*, maka pihak keluarga atau *pratisentana* (keturunan) yang bersangkutan tidak perlu ragu lagi, apakah sang atma yang diupacarai itu sampai di Pitara Loka ataukah tidak. Sang atma pasti sampai di Pitara Loka, karena memang sudah *kadandanin/katuntun* (dituntun) oleh Ida Batara *Kawitan*.

Begitulah pentingnya Kajang dan Tirta Kawitan sebagai bentuk nyata *panugerahan* (anugerah) Ida Batara Kawitan, yang dimohonkan oleh *pamangku* Merajan Kawitan atau Pura Dadya pihak sang *layuan* bersangkutan. *Kajang Kawitan* dan *Tirta Kawitan* ini merupakan kelengkapan khas atau khusus dalam upacara *ngaben/palebon* penganut Hindu Bali.

Lantas, bagaimana bila tidak *nunas* Kajang Kawitan dan Tirta Kawitan? Dengan sendirinya itu berarti tidak *nuwur* (memohon mengundang) Ida Batara-Batari Kawitan. Dengan tidak *nuwur* Ida Batara-Batari Kawitan, itu berarti Ida Batara-Batari Kawitan tidak dibutuhkan oleh *pratisentana ngarep* atau pihak keluarga yang menyelenggarakan upacara *ngaben/palebon*. Secara runut ini selanjutnya berarti sang atma tidak mendapatkan tuntunan jalan dari Ida Batara Kawitan untuk menuju alam Pitara Loka. Karena tidak mendapatkan tuntunan jalan dari Ida Batara Kawitan, maka kita tidaklah tahu dengan jelas dan benar entah ke mana arah yang dituju oleh sang atman setelah meninggalkan badan kasarnya. Terlebih-lebih lagi bila *karma wasana*-nya, bekas-bekas karmanya semasa hidup, belum memenuhi syarat untuk mencapai Pitara Loka.

Dengan demikian dapat dibayangkan, bagaimana jadinya perjalanan sang atma bila tidak mendapatkan doa, restu, serta tuntunan dari Ida Batara Kawitan yang diwujudkan nyata dalam bentuk Kajang Kawitan dan Tirta Kawitan. Begitu pula sebaliknya, bila Ida Batara Kawitan yang sudah berstana di Dewa Loka, Tri Purusa, terlebih lagi yang sudah berstana di Padmasana berkenan *tedun nuntun-nandanin* (turun menuntun) sang atman lewat wujud nyata Kajang Kawitan dan Tirta Kawitan. Dalam hal ini Kajang Kawitan dan Tirta Kawitan akan bermakna sebagai restu, sekaligus sebagai penyucian, *palukatan*, pangentas, dan juga sebagai penuntun bagi sang atma menuju Pitara Loka.

Sampai di sini mudah-mudahan dapat lebih dipahami perihal peran, fungsi, dan makna Kajang Kawitan dan Tirta Kawitan. Begitu juga menjadi semakin jelas dapat dipahami kerangka dan alur berpikir, kenapa penganut Hindu Bali secara khusus dan khas memohon Kajang Kawitan dan Tirta Kawitan dalam upacara *ngaben/palebon*.

10.5 *Cuntaka*

Cuntaka hanya dikenal di kalangan masyarakat penganut Hindu Bali. Meskipun demikian, sampai saat ini *cuntaka* masih saja sering menjadi perdebatan dan juga mengundang pertanyaan-pertanyaan dari penganut Hindu Bali. Pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul, antara lain, sebagai berikut.

1. Apa itu *cuntaka*?
2. Siapa yang *cuntaka*?
3. Dalam keadaan apa seseorang dinyatakan *cuntaka*?
4. Berapa lama *cuntaka* berlangsung?
5. Seberapa luas cakupan wilayah *cuntaka*?

Pertanyaan-pertanyaan demikian dapat dipahami, karena sejumlah alasan, antara lain sebagai berikut.

1. *Cuntaka* tidak jelas rujukannya dalam pustaka suci Weda.
2. *Cuntaka* lebih banyak didasarkan pada *dresta* (pandangan yang ditradisikan) sehingga menjadi kebiasaan setempat, atau kesepakatan adat (*pararem*) setempat.
3. *Cuntaka* selalu tergantung kepada *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (orang).
4. *Cuntaka* juga selalu tergantung pada kepentingan.

Cuntaka pada intinya dapat diartikan sebagai “keadaan berhalangan” untuk melaksanakan maupun menghadiri upacara tertentu, dan/atau memasuki tempat suci (pura maupun areal upacara yang telah disucikan).

10.5.1 Jenis *Cuntaka*

Cuntaka atau keadaan berhalangan itu bisa dikategorikan menjadi dua kelompok. **Pertama**, *cuntaka* karena tidak boleh atau tidak diperbolehkan. *Cuntaka* jenis ini dinamakan *sebel kandelan*. Maksudnya adalah *sebel* (halangan atau “kekotoran”) yang melekat di badan fisik atau melekat pada badan mental/psikis. Hal ini terjadi karena disepakati bahwa setiap benda yang sudah melekat pada badan fisik dan/atau badan mental bila lepas dari posisinya semula (badan fisik atau badan mental), maka itu disepakati telah menjadikan “keadaan *sebel*” (halangan atau kekotoran) yang bisa *ngaletehin* (mengotori, mencemari) tempat suci ataupun areal yang sudah disucikan. Jenazah, misalnya, dikategorikan *sebel* atau *leteh* oleh penganut Hindu Bali karena sudah lepas dari atman. Begitu juga dengan bagian-bagian tubuh yang terlepas dari kesatuan badan, seperti darah, air susu, kencing, kotoran, ludah, air mani, misalnya, manakala telah menetes atau lepas dari tubuh itu dikategorikan *sebel* atau *leteh*, sehingga tidak diperbolehkan sampai terjadi di tempat suci atau areal yang sudah disucikan.

Contoh lain, misalnya, pakaian yang sudah dipakai, kemudian dibuka dan akhirnya ditaruh di *palinggih* Ida Batara, itu jelas termasuk *sebel*—dan karenanya dilarang. Terlebih lagi bila itu pakaian dalam. Bahkan *destar* (ikat kepala lelaki Hindu Bali) sekalipun akan menyebabkan *leteh* bila dilepaskan dari kepala, lalu ditaruh di *palinggih*. Namun pakaian yang tetap dipakai, termasuk pakaian dalam sekalipun, tidak akan dikategorikan *ngaletehin* apabila tetap dipakai di badan. Sekalipun yang memakai pakaian itu naik ke *palinggih* Padmasana, tetap saja diperbolehkan.

Kedua, *cuntaka* karena tidak bisa atau tidak mampu melaksanakannya. Misalnya, ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Saat bersamaan juga ada *piodalan* di Pura Dadya atau di Pura Desa. Bagaimana mungkin dapat melaksanakan sekaligus sembahyang ke pura dengan kegiatan *pitra yadnya* (*ngaben/palebun* ataupun mengubur jenazah) di pihak lain? Tentu akan dikorbankan salah satu, dan karena itulah pihak keluarga yang punya *layon* (jenazah) dinyatakan *cuntaka*, sehingga tidak *tangkil* sembahyang ke pura. *Piodalan* di pura tetap saja dilangsungkan—dan tidak mungkin dibatalkan, karena memang sudah terjadwal pasti.

Demikian juga halnya bila saat dilangsungkan *karya* di Pura Dadya, atau di Pura Kahyangan Desa, saat bersamaan ada pula keluarga atau *krama* yang meninggal. Yang dikalahkan biasanya adalah upacara orang yang meninggal. Hal ini dilakukan mengingat *karya* (upacara besar dan khusus) ini merupakan upacara yang sangat penting, perlu persiapan waktu lama, biaya besar, dan prosesnya pun sangat sakral, sehingga tidak mungkin dikorbankan, tidak mungkin pula dihentikan, apalagi dibatalkan. Jadi, di sini unsur kepentingan yang diutamakan: yang mana lebih penting, lebih utama, *karya* atau *ngaben/palebon*? Yang mana dinilai lebih penting maka itulah yang didahulukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *cuntaka* kelompok pertama (*sebel kandelan*) merupakan *cuntaka* yang bersifat **mutlak**, tidak boleh dilanggar. Adapun *cuntaka* kelompok kedua merupakan *cuntaka* yang bersifat **fleksibel**. Maksudnya, *cuntaka* kategori kedua ini tergantung kepentingan, kesepakatan bersama para pihak, *dresta*, *awig-awig*, atau *pararem*.

Mengapa fleksibel dan tergantung *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (orang)? Karena *cuntaka* kelompok kedua ini semata-mata akibat alasan teknis pelaksanaan upacara, selain bergantung pada kepentingan dan keadaan. *Cuntaka* kelompok kedua juga disebabkan atau berhubungan dengan keadaan *ala* dan *ayu*, atau antara upacara/acara *ala* yang dihadapkan dengan upacara/acara *ayu*. Istilah *ala* dan *ayu* sangat berhubungan dengan emosional atau perasaan hati, berhubungan dengan suasana batin, suasana pikiran, dan suasana jiwa. *Ala* merupakan suasana batin, pikiran, perasaan, jiwa yang sedih, kacau karena kesedihan, kedukaan. Sebaliknya, *ayu* berkaitan dengan suasana senang, gembira, bahkan bahagia.

Contoh acara/upacara yang tergolong *ala*, misalnya, upacara kematian (*ngaben/palebon* ataupun mengubur jasad). Acara/upacara yang tergolong *ayu*, contohnya, *ngarorasin/mamukur* atau *baligya*. Begitu juga dengan semua upacara *dewa yadnya*, *rsi yadnya*, dan *manusa yadnya*.

10.5.2 Batas (*Sengker*) *Cuntaka*

Pertanyaan selanjutnya yang kerap muncul terkait dengan *cuntaka* adalah, berapa lama *sengker* (batas waktu) tersebut berlangsung? Antara *cuntaka* kategori pertama (*sebel kandelan*) dan kategori kedua (karena tidak mampu melaksanakan) batasan waktunya saling berbeda.

Batas waktu (*sengker*) *cuntaka* yang berhubungan langsung dengan acara/upacara *ala*, bila dilanjutkan dengan acara/upacara *ayu*, berlangsung selama 12 hari. Ini lazim dinamakan *ngaroras*. Misalnya, dari upacara *ngaben/palebon* dadakan ke upacara *ngaroras/mamukur/baligya*, ditentukan *sengker cuntaka* (selang atau jeda waktu) paling cepat 12 hari. Ada pula yang menerapkan jeda waktu 42 hari.

Saya sendiri lebih sependapat memakai *sengker* minimum 42 hari yang di Bali dinamakan *abulan pitung dina*. Mengapa? Ini karena pertimbangan filosofis, psikologis, dan bahkan spiritual. Telah dipaparkan bahwa upacara *ngaroras/mamukur/baligya* itu merupakan upacara yang sangat penting. Ini merupakan serangkaian upacara mendoakan supaya sang Pitara terangkat dari Pitara Loka ke Dewa Loka dengan doa (*puja stuti* dan *stawa*) yang diuncarkan dan upacara yang diselenggarakan. Oleh karena itu, upacara *ngaroras/mamukur/baligya* ini jelas

sangat membutuhkan *banten* yang minimum lengkap, puja *stuti* dan *stawa* yang juga minimum lengkap, ditambah lagi doa-doa yang khushyuk, *suci ning nirmala tan paletih*, dari segenap keluarga sang Pitara. Untuk itu jelas diperlukan suasana rasa hati, suasana batin, jiwa, dan pikiran yang tenang, rahayu, ikhlas, serta benar-benar terbebas dari kesedihan. Sebaliknya, justru harus diselenggarakan dalam suasana yang benar-benar tulus, riang gembira, dan bahagia.

Guna mencapai perubahan suasana hati, pikiran, batin, dan jiwa dari kesedihan akibat kematian menuju ke suasana yang tulus, riang gembira, harmonis, dan bahagia itulah maka diperhitungkan diperlukan *sengker* atau jeda waktu minimum 12 hari (*roras lemeng*), atau malahan 42 hari (*abulan pitung dina*). Lebih daripada dasar pertimbangan psikologis tersebut, yang tidak kalah penting lagi adalah dasar pertimbangan filosofis dan spiritual, mengapa *sengker* peralihan suasana batin itu perlu diperhatikan? Ini karena menurut keyakinan Hindu Bali, sang atman (Pitara) perlu *jenek* (tinggal dalam tempo waktu yang cukup) di satu *loka* sebelum melanjutkan perjalanan ke *loka* selanjutnya. Perjalanan yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan sang atman (Pitara) dari Pitara Loka (alam Leluhur) menuju ke Dewa Loka (alam Dewa), selanjutnya menuju ke *loka* lebih tinggi, seperti Tri Purusa Loka, hingga di Padmasana Loka atau Brahman Loka. Tidaklah bisa *ujug-ujug* langsung melesat dari marcapada (alam fana manusia) ke Dewa Loka, tanpa tinggal sejenak (*jenek*) terlebih dahulu di Pitara Loka.

Supaya mampu naik ke *loka* yang lebih tinggi daripada loka-loka sebelumnya, atman sang Pitara juga perlu menjalani proses *tapa-brata-yoga* dan *samadi* di setiap *loka* yang dimasuki. Proses tersingkat yang harus dilalui adalah minimum 12 hari. Ini tentu tergolong proses yang sangat singkat, memang, apabila dibandingkan dengan lama rata-rata proses *tapa-brata-yoga-samadi* yang dilakukan manusia semasa hidupnya di Marcapada Loka ini, yang rata-rata sampai berumur 70 tahun!

Dari paparan tadi dapat disimpulkan, bahwa alasan penetapan *sengker* minimum 12 hari, atau bahkan 42 hari, antara upacara *ngaben/palebon* dadakan ke upacara *ngaroras/mamukur/baligya*, antara lain, sebagai berikut.

1. *Ngaroras/mamukur/baligya* memang tidak perlu dilakukan tergesa-gesa, karena setelah di-*aben/palebon*, sang Pitara sudah sangat baik dan tenang di Pitara Loka.
2. Perlu proses waktu minimum untuk pemulihan atau peralihan suasana perasaan hati, pikiran, batin, maupun jiwa dari keadaan sedih, kalut, akibat kematian ke suasana hati yang ikhlas, rahayu, riang gembira, dan bahagia.
3. Dengan demikian perlu *sengker cuntaka* minimum selama 12 hari, untuk menuju proses upacara *ngaroras/mamukur/baligya*.
4. *Ngaroras/mamukur/baligya* merupakan *karya ayu* yang membutuhkan suasana batin yang ikhlas, rahayu, riang gembira, bahkan bahagia.
5. Proses perubahan suasana ini tidak mungkin terjadi dengan baik secara utuh dan menyeluruh hanya dengan sudah menggelar *pacaruan*.

Di luar kelaziman yang telah dipaparkan dengan alasan-alasan dasar pertimbangan psikologis, filosofis, maupun spiritual tersebut, memang, mesti diakui ada pula praktik lain. Sejak pertengahan dasawarsa 1990-an, misalnya, mulai sering dilakukan di masyarakat Hindu

Bali proses upacara *ngalanus* atau *atandang mantri*. Dasar logikanya tidak Penulis pahami, karena Penulis tidak menganut paham tersebut. Mungkin alasan kebutuhan atau alasan “kepentingan” yang lebih diutamakan, antara lain, supaya cepat selesai (*pang gelis puput*), praktis, dan ekonomis.

Cuntaka sebel kandelan, yang memang tidak boleh dilanggar, ini memang seharusnya ada tafsiran dan dasar ketentuan yang jelas. Sayangnya, sampai sekarang sering berkembang tidak jelas dan kerap muncul beragam perbedaan tafsir. Di desa-desa yang berdekatan dengan Pura Luhur, misalnya, masyarakat mengenal tradisi tidak boleh membakar jenazah. Akibatnya, jenazah itu dibiarkan terkubur selama-lamanya. Alasannya, katanya, karena “asap pembakaran jenazah bisa *ngaletihin* pura?” Benarkah demikian?

Belakangan malah berkembang tafsiran baru: manakala ada *karya ayu* di Pura Kahyangan Jagat, maka masyarakat sekecamatan, bahkan sekabupaten sampai se-Bali tidak diperbolehkan membakar jenazah atau *ngaben/palebun*. Apakah harus demikian?

Terlalu banyak tafsir yang muncul, memang, sehingga cakupan *sengker* waktu maupun wilayah *cuntaka* ini menjadi tidak jelas, tidak ada kepastian. Dasar pijakan susastra agamanya memang tidak jelas. Lebih sering memakai pijakan perasaan masing-masing, bukan sloka-sloka kitab suci. Sejujurnya, Penulis pun belum bisa memberikan kepastian, terkecuali mengajukan dasar pertimbangan psikologis, filosofis, dan spiritual khusus terkait dengan *sengker cuntaka* dari saat upacara *ngaben/palebun* sampai diselenggarakan *ngaroras/mamukur/baligya* yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Berbeda halnya dengan *sengker cuntaka* kelompok kedua (berhalangan karena tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan). Karena *cuntaka* kelompok kedua ini sangat fleksibel dan bersifat teknis, lama-kelamaan akhirnya berkembang menjadi *cuntaka* atas dasar solidaritas kekerabatan, atau juga atas dasar hubungan *sesana* (etika).

Dalam hal atas dasar solidaritas kekerabatan, maka *cuntaka* jenis ini digunakan sebagai tanda simpati, ikut berbelasungkawa antarkerabat. *Cuntaka* jenis ini pun akhirnya berkembang juga menjadi berdasarkan “hubungan *sesana*”, seperti saling berbalas kebaikan, atau saling berbalas kewajiban. Misalnya, saat keluarga si A ada kematian, keluarga si B pun turut menyatakan diri *kacuntakan*. Sebaliknya, bila keluarga si B suatu saat ada kematian, maka keluarga si A pun akan bertindak sama, turut merasa *kacuntakan*. Tentu saja hubungan *kacuntakan* jenis ini bersifat sangat fleksibel. Hubungan bisa berakhir setiap saat, dan solidaritas saling *cuntaka* ini pun bisa pula berakhir.

Hubungan *cuntaka* jenis ini memang juga sering diakhiri secara terbatas. Misalnya, satu keluarga *dadya* sudah menjadi keluarga yang besar, dengan jumlah lebih dari 300 kepala keluarga (KK). Bila 300 KK ini terus saling bersolidaritas *cuntaka* setiap kali di antara keluarga mereka ada kematian, maka bisa jadi *piodalan* atau hari raya, seperti Galungan, tidak diselenggarakan berturut-turut. Guna menghindarkan hal itu, maka wilayah atau batasan keluarga yang terkena *cuntaka* pun akhirnya dibatasi.

Demikian juga halnya dengan *cuntaka banjar*, atau bahkan desa. Dahulu *cuntaka* yang mencakup wilayah se-*banjar* atau sedesa adat/desa pakraman memang diberlakukan manakala

ada *krama* (warga) adat banjar/desa bersangkutan meninggal. Namun belakangan ini, karena perkembangan zaman, ketentuan *cuntaka* itu semakin banyak tidak lagi diterapkan. Pada masa lampau *cuntaka* banjar/desa disepakati dan diberlakukan bisa jadi karena sejumlah alasan, antara lain:

1. jumlah *krama* (warga) sedikit, ada satu desa adat/pakraman hanya terdiri atas 30 KK;
2. belum ada pengawet jenazah, seperti formalin, es, dan lain-lain;
3. jenazah supaya tidak cepat busuk dan bau harus segera di-*aben/palebun* (bila ada *dewasa ayu*), atau harus segera dikubur (bila belum ada *dewasa ayu* untuk *ngaben*).

Akibat *krama desa* di masa lampau jumlahnya sedikit, maka manakala ada yang meninggal dunia, semua *krama* pun dilibatkan untuk mengurus *krama* yang meninggal tersebut. Dengan demikian *cuntaka* desa pun diberlakukan, karena mengupacarai jenazah menjadi prioritas seluruh *krama* desa. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah *krama* (penduduk), dan juga alat pengawet jenazah sudah banyak tersedia, maka alasan pemberlakuan *cuntaka* yang demikian pun tidak cocok lagi. *Cuntaka* banjar/desa pun dihapus. Itu menyebabkan pada saat ada *krama* desa meninggal, kelompok yang punya acara *piodalan* atau upacara *manusa yadnya*, misalnya, tetap bisa menjalankan upacara *yadnya*-nya itu. Ini bisa dilakukan karena jumlah tenaga untuk mengurus upacara jenazah sudah cukup banyak. Ini lebih menegaskan lagi betapa *cuntaka* kelompok kedua memang benar diberlakukan karena alasan teknis, solidaritas, atau hubungan *sesana*, sehingga sangat fleksibel.

10. 6 Samsara (Punarbawa)

Samsara atau *punarbawa* secara sederhana diartikan sebagai kelahiran kembali, atau lahir kembali ke dunia fana ini. Dalam pandangan Hindu Bali, *punarbawa* diyakini sebagai *ngiyangin* atau yang “memberi” atman, yang memberi jiwa dari atman-nya. Atman Asal atau sumber atman yang memberi atman kepada si bayi yang lahir itu dinamakan *Parama Atma* atau *Atma Tattwa Atma*. Ini berarti saat *punarbawa* atau *ngiyangin* itu terjadi, sesungguhnya leluhur/kawitan yang lahir itu tidak hilang dari Dewa Loka. Beliau tetap utuh di Dewa Loka, walaupun nantinya Beliau itu lahir dalam lebih daripada satu turunan. *Punarbawa* bagi keyakinan Hindu Bali tidaklah lahir di sembarang keluarga, melainkan di keluarga bersangkutan sebagai penerus keturunannya.

Punarbawa atau *ngiyangin* tidak dapat dilaksanakan oleh Kawitan atau Pitara yang masih di Pitara Loka, apalagi Pitara yang jasadnya masih dikubur. Ini karena atman atau Pitara yang masih berada di Pitara Loka belum bersifat *wyapi wyapaka nirwikara* (ada di mana-mana tanpa halangan), sehingga tidak mungkin memberi Atman dari atman-nya.

Alur berpikir keyakinan ini jelas. Penganut Hindu Bali menyembah Kawitan/Leluhur. Diyakini Kawitan/Leluhur suatu saat cepat atau lama pasti sampai di Dewa Loka, dalam arti berstana di Tri Murti, di Tri Purusa, atau bahkan mencapai Acintya. Andaikan Kawitan/Leluhur itu harus hilang dari stananya saat *ngiyangin*, maka bisa jadi Kawitan itu akan kosong di Tri Murti maupun di Tri Purusa. Lantas, siapa yang disembah?

Kekosongan Batara Kawitan itu tentu tidak mungkin. Beliau tetap di stananya. Beliau memang mampu lahir kembali dengan cara *ngiyangin*. Sifat punarbawa dengan cara *ngiyangin* ini tidaklah berbeda dengan kelahiran Dewa Wisnu menjadi berbagai *awatara*, misalnya, Dewa Wisnu menjelma menjadi Sri Rama, menjadi Sri Krisna. Apakah dengan menjelma menjadi Rama atau Krisna itu lantas Dewa Wisnu “hilang” dari Wisnu Loka? Tentu saja tidak. Dewa Wisnu tetap utuh, abadi, sempurna, bahkan tetap maha sempurna, di Wisnu Loka meskipun mewujud sebagai sosok manusia *awatara* bernama Rama dan Krisna.

11. Upacara

Ada dua pertanyaan mendasar yang kerap muncul berkenaan dengan upacara agama Hindu Bali. Pertama, apa makna tingkatan upacara *nista*, *madya*, *utama* itu? Kedua, benarkah upacara itu merupakan pemborosan atau bahkan penyebab kemiskinan?

Sebelum sampai pada jawaban terhadap kedua pertanyaan tersebut, sangat penting dipahami cara mendekati diri kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Mahaesa oleh penganut Hindu Bali. Pendekatan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dilakukan dengan berbagai cara oleh penganut Hindu Bali.

1. Pendekatan dengan pikiran atau perasaan. Dalam hal ini pikiran dan perasaan yang digunakan adalah pikiran dan perasaan tulus ikhlas seikhlas-ikhlasnya (*lascarya nekeng tuwas*) untuk berbakti kepada-Nya. Pikiran yang tidak pernah mengeluh kepada-Nya, juga tidak pernah memprotes-Nya, dalam keadaan apa pun adanya. Bila memiliki kesulitan, bahkan dalam keadaan mara bahaya sekalipun, penganut Hindu Bali yang tulus ikhlas tidak akan memprotes maupun mengeluh kepada Tuhan, melainkan hanya memohon dan terus memohon agar diberikan jalan dan tuntunan supaya bisa keluar dengan selamat dari kesulitan ataupun marabahaya. Pendekatan dengan jalan pikiran juga dilakukan dengan tiada henti memanjatkan rasa *angayu bagia* (berterima kasih dan bersyukur) kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
2. Pendekatan dengan perkataan atau ucapan. Yang dimaksudkan di sini adalah perkataan yang baik, bermanfaat untuk hidup dan kehidupan, perkataan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Perkataan yang penuh dengan doa, harapan, dan dorongan untuk kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Jadi yang termasuk pendekatan perkataan atau ucapan di sini adalah pendekatan ucapan dalam bahasa biasa, bahasa sehari-hari, penyebutan Nama-Nama Tuhan, sampai pada dengan puja mantra.
3. Pendekatan dengan nyanyian. Ida Sang Hyang Widhi beserta seluruh Ista Dewata sangat senang dengan keindahan dan nyanyian, karena nyanyian juga mengandung unsur keindahan. Tentu nyanyian yang dimaksudkan di sini adalah nyanyian yang baik dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan, baik syair maupun lagunya. Jenis-jenis

nyanyian Hindu Bali, antara lain: nyanyian biasa; kidung, *wirama* (*kakawin*), *palawakya*; mantram-mantram (sloka dan sloka suci) yang dinyanyikan dengan *hreng* dan nada *nyloka* yang khusus.

4. Pendekatan dengan upacara. Upacara merupakan pendekatan yang sangat penting dalam Hindu Bali. Tidak mungkin dapat disebut Hindu, lebih-lebih Hindu Bali, bila tanpa pendekatan upacara, mengingat kerangka agama Hindu ada tiga, yaitu *tattwa* (filsafat) yang bersumber dari Weda, susila (etika), dan upacara. Makna upacara dalam kaitan ini mencakup lima tujuan, yakni: (1) memuja Tuhan; (2) bersyukur (*angayu bagia*); (3) berterima kasih (*parama suksma*); (4) memohon tuntunan, memohon berbagai anugerah; dan (5) memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa.
5. Pendekatan dengan perbuatan sosial. Terutama yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan yang berkaitan dengan agama, adat, budaya, kemasyarakatan, dan lingkungan.
6. Pendekatan kerja. Kerja yang diutamakan adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dengan tetap berpijak pada ajaran Karma Yoga, Bakti Yoga, dan Catur Purusa Artha yang mencakup *dharma* (harus tetap sebagai landasan utama kerja), *artha* (dana/kekayaan), *kama* (kebutuhan dan keinginan-keinginan hidup), dan *moksa* (pembebasan hingga menyatu di alam Tuhan Yang Mahaesa, sehingga mencapai kebahagiaan abadi, *suka tan pawali duka*, dan mengikuti sifat-sifat Tuhan).
7. Pendekatan dengan *tapa-brata-yoga-samadi*. Belakangan ini memang banyak masuk aliran keagamaan Hindu lain ke Bali, termasuk daerah-daerah lain di Indonesia. Aliran-aliran ini tentu saja berbeda, bahkan sangat berbeda, dengan Hindu Bali, baik dari segi filsafat teologinya maupun etika atau susilanya. Dalam banyak sekte atau aliran yang baru masuk ini, upacara bahkan dianggap tidak perlu. Aliran-aliran ini masuk ke dalam keluarga-keluarga Hindu Bali. Beberapa orang dari beberapa keluarga terbujuk atau tertarik dengan aliran-aliran baru ini yang memang kebanyakan kelihatan lebih ekonomis dan lebih praktis—padahal agama tidak dapat diukur dari hanya sekadar ekonomis dan praktis, sebagaimana halnya diingatkan lewat ajaran *tapa-brata-yoga-samadi* dalam Hindu Bali. Tidak semua hal dapat diukur dan diselesaikan hanya dengan pendekatan ataupun pertimbangan ekonomis dan praktis.

Tidak heran bila kemudian terjadi masalah-masalah krusial dalam satu keluarga, karena suami, istri, atau anak-anak sudah saling berbeda jalan keagamaan—padahal jalan keagamaan itu sangat prinsip dan sensitif. Misalnya, sang istri tiba-tiba tidak mau *mabanten* atau terlibat dalam upacara keagamaan Hindu Bali. Kondisi ini tidak jarang malah berakhir dengan perceraian. Begitu juga muncul masalah krusial dalam kelompok keluarga atau *dadya* karena dipicu yang sama. Tentunya masalah yang

demikian harus menjadi perhatian kita bersama. Kita harus selalu bersikap dan bertindak bijak untuk kerukunan dan kedamaian, kita harus selalu ingat etika antaragama atau antar-keyakinan. Binalah setiap umat supaya lebih mantap dengan agamanya, bukan malah dibelokkan keyakinannya.

11.1 Syarat-Syarat Keutamaan Upacara

Kedudukan dan makna upacara agama dalam Hindu Bali sangat penting, memang. Selain sebagai keyakinan, upacara juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agama Hindu, sehingga dimasukkan ke dalam tiga kerangka agama Hindu. Upacara juga tidak akan pernah memberatkan penganut Hindu Bali, bila syarat-syarat pelaksanaannya dipenuhi. Syarat-syarat upacara supaya mendapatkan makna keutamaan, yaitu:

1. dilaksanakan atas dasar pikiran suci, dalam arti dilaksanakan dengan tulus ikhlas (*lascarya nekeng tuas*), dengan perasaan senang, bahkan penuh bahagia.
2. harus sesuai dengan kemampuan (*nista, madya, utama*).
3. harus dilaksanakan dalam keadaan batin yang tenang dan rahayu.
4. harus dilaksanakan sesuai dengan *lelutuk banten*, baik dari segi jenis *banten* maupun dari segi besaran upacara (*nista, madya, utama*).
5. harus memenuhi kelengkapan tatanan upacara, juga sesuai dengan tingkatan upacara *nista, madya, utama*. Kelengkapan bertalian dengan *banten, wali, tetabuhan* (gambelan wali), *pamutruan, kidung*, perlengkapan sarana upacara, *pamuput* upacara, dan prosedur (*eedan*) upacara.

Di antara syarat-syarat tersebut, yang sering menjadi pertanyaan adalah apa batasan kemampuan untuk berupacara? Apa pula makna tingkatan *nista, madya, utama*?

Kemampuan yang dimaksudkan di sini terutama adalah kemampuan pembiayaan (finansial) yang dimiliki oleh penyelenggara upacara, sehingga pembiayaan tersebut tidak dirasakan memberatkan, tidak sulit mendapatkan, dan tidak pula menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya, tidak sampai harus menjual tanah, tidak sampai berutang tapi bermasalah dalam pengembaliannya atau bahkan utang-utang upacara itu tidak terbayar. Bilapun mesti berutang, tetap mesti gampang dapat dikembalikan.

Lebih sederhana dapat dikatakan bahwa kemampuan pembiayaan upacara sepatutnya jangan sampai menimbulkan masalah, jangan sampai menimbulkan keluhan, jangan sampai menimbulkan pertengkaran, dan juga jangan sampai memberatkan keluarga ataupun *krama* (warga) desa. Biaya upacara tetap harus dikeluarkan dengan tulus ikhlas, senang, dan bahkan bahagia.

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan tingkatan *nista-madya-utama* adalah pilihan yang dipilih secara bebas berkenaan dengan tingkatan besar kecilnya upacara. Keseluruhan tingkatan itu ada sembilan, mulai dari tingkatan paling sederhana: (1) *nistaning nista*, (2) *madyaning nista*, (3) *utamaning nista*; lalu tingkatan sedang/menengah: (4) *nistaning madya*, (5) *madyaning*

madya, (6) *utamaning madya*; sampai pada tingkatan besar/megah: (7) *nistaning utama*, (8) *madyaning utama*; dan yang terbesar adalah (9) *utamaning utama*.

Nistaning nista adalah bentuk upacara paling kecil (inti), paling ekonomis, murah, dan karenanya tentu sangat praktis, sangat mudah mempersiapkan dan menyelenggarakannya. Sedangkan *utamaning utama* adalah bentuk upacara terbesar (megah), sehingga pasti membutuhkan biaya besar, tentunya juga memerlukan proses persiapan dan penyelenggaraan yang cukup lama.

Nista-madya-utama dalam kaitan dengan besar-kecil upacara disebut tingkatan kuantitatif. Sedangkan *nista-madya-utama* dalam kaitan tingkatan makna upacara (ukurannya: seberapa tingkat keberhasilannya) disebut tingkatan kualitatif.

Atas dasar tingkatan kuantitatif dan kualitatif tersebut, maka bisa saja upacara yang tingkatan kuantitasnya *nista* namun tingkatan kualitas (*kasuksman*)-nya justru *utama*. Ini bisa terjadi karena tingkatan kuantitas yang *nista* itu justru didukung sepenuhnya dengan pemenuhan syarat-syarat keutamaan upacara, sebagaimana telah dikemukakan tadi. Demikian juga sebaliknya, walaupun upacara diselenggarakan dengan mengambil tingkatan kuantitas yang *utama*, namun hasilnya justru *nista*, atau bahkan menjadi *nirdon* (tidak bermakna sama sekali), karena tidak memenuhi syarat-syarat keutamaan upacara, dan juga banyak cacatnya.

Sudah tentu yang terbaik adalah pengambilan tingkatan upacara dengan kuantitas *utamaning utama* yang sekaligus diikuti sepenuhnya dengan pemenuhan syarat-syarat keutamaan upacara. Hasil upacara sekelas ini sudah tentu pula sangat *utama* (tertinggi), *utamaning utama*, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (*kasuksman*).

Jadi, syarat kemampuan (finansial) dan syarat ketulus-ikhlasan dalam memilih tingkatan *nista-madya-utama* suatu upacara itu merupakan unsur yang sangat penting untuk memperoleh hasil yang utama secara kualitas. Kemampuan (finansial) dan ketulus-ikhlasan secara konkret dapat diilustrasikan sebagai berikut.

- Ada kewajiban upacara yang penyelenggaranya tergolong mampu (kaya). Upacara ini sepatutnya membutuhkan tingkatan kuantitas *utama*, namun karena alasan ingin ekonomis, praktis, dan cepat, lantas orang mampu (kaya) ini justru memutuskan memilih tingkatan *nista*. Hasilnya dapat dikategorikan menjadi *nista*, karena terdapat unsur kikir atau loba dalam penentuan upacara tersebut.
- Ada kewajiban upacara yang sepatutnya diselenggarakan dalam tingkatan *utama*. Misalnya, *karya* ini sudah 100 tahun lebih tidak pernah dilaksanakan. Tetapi yang punya kewajiban menyelenggarakan upacara ini memang benar dari kelompok tidak mampu. Si penyelenggara ini dengan penuh ikhlas lantas memilih tingkatan *nistaning madya*. Syarat-syarat keutamaan upacara dipenuhi nyaris sempurna. Hasil atau *kasuksman* upacara ini adalah *utama*—karena diselenggarakan dengan jujur, tulus ikhlas, tanpa mengada-ada.
- Ada kewajiban upacara yang sepatutnya diselenggarakan dalam tingkatan *utama*, tetapi yang punya kewajiban sungguh-sungguh tidak mampu. Meskipun demikian, si penyelenggara memaksakan diri tetap mengambil tingkatan *utama*. Ia lantas menjual

tanah warisan. Tidak cukup juga. Ia pun berutang lagi, meskipun tidak mungkin terbayar. Masih tidak cukup juga. Akhirnya si penyelenggara upacara ini mengumpulkan dana yang menimbulkan kegaduhan. Upacara ini secara kasat mata memang terlihat utama, namun *kasuksman* atau hasilnya justru menjadi *nistaning nista*, bahkan justru *nirdon* (tidak bermakna sama sekali) karena menimbulkan kegaduhan dan mewariskan masa depan suram bagi keluarganya.

Ilustrasi tersebut menunjukkan jelas bahwa makna (*kasuksman*) *yadnya* atau upacara tidaklah semata-mata ditentukan oleh sekadar pemilihan *nista-madya-utama* secara kuantitas, melainkan mutlak ditentukan oleh lima syarat keutamaan upacara. Dengan adanya sembilan kelompok tingkat besar-kecil (kuantitas) *yadnya* atau upacara, sepatutnya tidak ada lagi wacana penyederhanaan upacara ataupun pembesaran upacara. Kenapa? Karena tingkatan upacara *nistaning nista* sudah tidak dapat lagi disederhanakan—kecuali memang tidak ada niat melaksanakan upacara. Begitu pula sebaliknya, jangan lagi menambah-nambah *lelutuk* upacara yang sudah tingkat *utamaning utama*.

Hal lain yang dapat ditegaskan adalah bahwa yang kaya/mampu jangan kikir, tidak ikhlas, dan berlagak tidak mampu. Begitu pula sebaliknya, yang memang tidak mampu, bahkan miskin secara ekonomi, jangan boros, memaksakan diri, berlagak mampu atau kaya. Pada saat miskin atau tidak mampu selenggarakanlah upacara tingkatan *nista*. Sebaliknya, pada saat kaya/mampu selenggarakanlah upacara tingkatan *utama*.

Dalam hal menyelenggarakan upacara *yadnya*, kebiasaan-kebiasaan pada saat miskin janganlah diteruskan menjadi kebiasaan pada saat telah menjadi kaya. Demikian juga sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan pada saat kaya jangan pula diteruskan menjadi kebiasaan-kebiasaan pada saat sudah jatuh miskin. Keutamaan *yadnya* atau upacara—bahkan juga keutamaan hidup—sangat ditentukan oleh seberapa bijaksana kita menyesuaikan pilihan dengan kemampuan.

Kemampuan bukanlah diukur berdasarkan berapa banyak seseorang punya tanah, sawah, atau kebun. Tanah, sawah, tegalan, atau kebun bukanlah kemampuan. Itu semua adalah harta yang dianggap sebagai modal untuk memperoleh kemampuan. Adapun kemampuan haruslah diukur berdasarkan seberapa besar penghasilan seseorang per tahun, per bulan, per minggu, ataupun per hari. Seberapa besar gaji atau upah yang didapat, seberapa besar hasil yang diperoleh dari sawah, tegal, kebun, atau aset-aset yang dimiliki per bulan atau per tahun, itulah kemampuan riil seseorang.

Dari penjelasan ini menjadi terjawab jelaslah, betapa upacara bukanlah pemborosan. Upacara yang diselenggarakan oleh penganut Hindu Bali tidak benar menjadi penyebab kemiskinan atau pemiskinan. Sebaliknya, upacara justru bermakna luhur, bernilai tinggi, dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Upacara itu menyejahterakan dan membahagiakan.

Bila kemudian terjadi kasus-kasus pemborosan, atau bahkan menjadi miskin setelah menyelenggarakan upacara, sejatinyalah itu bukan karena upacara. Itu terjadi semata-mata karena salah si manusia yang tidak bijaksana dalam memilih tingkatan upacara, tidak menyesuaikan dengan kemampuan sendiri—malah mengedepankan gengsi pribadi ketimbang

kasuksaman upacara. Guna meluruskan kasus-kasus semacam inilah buku ini ditulis dan diterbitkan, untuk menjadi perhatian kita bersama.

11.2 Upacara dan Kesejahteraan

Upacara *yadnya* diselenggarakan dalam pandangan Hindu Bali dengan tujuan agar hidup dan kehidupan ini menjadi lebih rukun, lebih damai, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Melalui upacara *yadnya* penganut Hindu Bali memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Ista Dewata untuk tujuan-tujuan tersebut. Bila upacara berhasil, dalam arti memenuhi lima syarat keutamaan upacara, maka pastilah Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta seluruh Ista Dewata akan menurunkan anugerah-Nya. Pemaknaan upacara ini merupakan pemaknaan dalam konteks *niskala*, berupa keyakinan.

Adapun makna upacara *yadnya* secara nyata (*sakala*) sebagai sarana atau media kesejahteraan juga akan jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

1. Upacara sebagai alat perputaran ekonomi, terutama perputaran ekonomi antara desa (masyarakat komunal agraris) dan kota (masyarakat industrialis dan kapitalis). Karena upacara-lah perekonomian desa-desa di Bali menjadi hidup atau lebih hidup. Ini terjadi karena semua bahan upacara berasal dari desa dan/atau dari kreativitas masyarakat desa. Belakangan ini upacara keagamaan Hindu Bali bahkan juga telah mendukung perputaran ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa Timur, Lombok, hingga Sulawesi.
2. Upacara sebagai alat pemerataan kesejahteraan sosial. Analoginya hampir sama dengan butir 1 di atas. Masyarakat Bali masih mempertahankan cara kerja gotong-royong, kebersamaan, saling membantu. Setiap upacara besar penganut Hindu Bali akan melibatkan banyak orang, bahkan sampai ribuan orang. Mereka saling membantu, diberikan makanan dan minuman, dan tidak jarang juga mereka diberikan *dana punia* (biasanya penyelenggara upacara yang kaya akan memberi *dana punia* masyarakat yang kurang mampu yang datang membantunya). Itu sebab Penulis katakan bahwa setiap upacara *yadnya* di Bali merupakan salah satu wujud kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Upacara sebagai lapangan kerja. Sebagian besar pepohonan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, hingga buahnya berguna dan dibutuhkan sebagai sarana upacara. Ini menyebabkan para petani di desa lebih giat dan produktif bekerja, karena ada upacara yang menjanjikan, bahwa hasil kerjanya akan ditampung untuk kegiatan upacara keagamaan. Demikian juga sarana atau alat-alat upacara yang sangat banyak jumlah dan jenisnya itu merupakan barang-barang kerajinan ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat desa. Kerajinan-kerajinan dan alat-alat upacara itu selalu hidup dan

bertumbuh di Bali. Ini semua adalah pekerjaan, ini semua adalah lapangan kerja yang bahkan berorientasi ekonomi kerakyatan.

Oleh karena upacara menjadi sarana perputaran ekonomi, merupakan sarana pemerataan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai lapangan pekerjaan, maka itu berarti bahwa upacara sesungguhnya juga menjadi sarana pengentasan kemiskinan di Bali. Dengan demikian akan menjadi sangat naif dan menyedihkan bila masih ada pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa upacara yadnya penganut Hindu Bali itu sebagai pemborosan, atau bahkan dicap sebagai penyebab kemiskinan. Itu jelas pemahaman yang sangat dangkal terhadap makna substansial upacara-upacara Hindu di Bali.

11.3 *Bhuta Yadnya*

Terkait dengan penghormatan dan korban suci kepada *bhuta* yang diselenggarakan oleh penganut Hindu Bali, ada tiga hal penting yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak paham. Tiga pertanyaan itu adalah sebagai berikut.

1. Mengapa menghormati dan mengadakan korban suci kepada para *bhuta*?
2. Apakah benar ada para *bhuta* dan wujud-wujudnya?
3. Mengapa mengorbankan binatang, daging, darah, tuak, arak, berem, makanan, dan rempah-rempah yang berbau amis, seperti bawang, jahe, dan sebagainya?

Bhuta dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok *bhuta* utama (*mahabhuta*), sehingga dinamakan *Pancamahabhuta*. Kelima *mahabhuta* ini membentuk alam semesta beserta segala isinya yang disebut bhuana agung (makrokosmos). Kelima *mahabhuta* ini pula yang membentuk badan kasar (stula sarira atau raga sarira) badan manusia dan semua makhluk, yang disebut sebagai bhuana alit (mikrokosmos). Itu sebabnya watak manusia sangat kuat dipengaruhi oleh sifat-sifat *bhuta*. Bila sang atman tidak waspada dan selalu mengendalikan, maka niscaya watak *bhuta* itu pun akan lebih kuat pengaruhnya daripada watak sang Diri atau watak sang atman.

Pancamahabhuta itu adalah sebagai berikut.

1. *Pertiwi*: segala unsur zat padat, terutama adalah tanah dan *pancadhatu*.
2. *Apah* : segala unsur zat cair, terutama adalah air.
3. *Teja* : adalah segala unsur cahaya, panas, terutama unsur api.
4. *Bayu* : adalah segala unsur angin, yang mengeluarkan tenaga.
5. *Akasa* : adalah segala unsur yang halus, kosong, hampa, seperti ruang angkasa.

11.4 *Bhuta ya, Dewa ya*

Bila dicermati seksama maka unsur-unsur *Pancamahabhuta* itu tidak lain adalah unsur alam, unsur badan makhluk hidup—karena sebagai pembentuk alam dan badan manusia dan badan semua makhluk. Pada kaitan ini maka *bhuta* adalah sosok yang sangat dibutuhkan karena

sangat bermanfaat untuk perputaran dunia, untuk alam semesta, untuk hidup dan kehidupan. Tidak mungkin ada hidup dan kehidupan tanpa *bhuta*.

Dari sisi logika itulah maka secara etik manusia perlu berterima kasih kepada para *bhuta*, terlebih lagi kepada sang *Pancamahabhuta*. Bagaimana menyampaikan rasa terima kasih itu? Dengan menghormatinya. Menghormati *Pancamahabhuta* dengan mencakup tangan dalam sikap hormat, dan menjaga, memelihara, melestarikan alam lingkungan. Selain penghormatan juga ada upacara korban suci yang dinamakan *bhuta yadnya*. Wujudnya mulai dari yang terkecil berupa *saiban* atau *ejotan* setiap usai memasak, lalu *segehan*, caru, sampai yang terbesar berupa *tawur*. Korban suci ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan keinginan yang tulus ikhlas, *lascarya nekeng tuas*.

Kalau manusia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksanaan etika hidup dan kehidupan, dengan menghormati, menjaga, memelihara, melestarikan alam lingkungan, serta melaksanakan upacara *bhuta yadnya*, maka semua unsur *bhuta* itu pun akan senang, sehingga menyebabkan *bhuta hita*, yang unsur-unsur kekuatan alam yang berbahagia. Dari kebahagiaan ini selanjutnya para *bhuta* pun akan berubah menjadi bersifat Dewa, sebagai sang penolong, yang sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan semua makhluk, terutama manusia.

Sebaliknya, jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya, jarang, atau bahkan tidak pernah memberi korban suci kepada sang *bhuta* dan para *bhuta*, maka sang *bhuta* pun bisa marah dan menunjukkan sifat-sifat negatif atau destruktifnya yang dahsyat dan mengerikan. Begitu pula halnya bila manusia lalai memelihara dan menjaga alam lingkungan, seperti tanah, gunung, lautan, sawah, pohon-pohon, danau, sungai, udara. Unsur-unsur alam lingkungan ini bukannya dirawat, dilindungi, dipelihara, sebaliknya manusia bahkan cenderung merusaknya, maka para *bhuta* juga akan berbalik menunjukkan sifat destruktifnya yang mengancam keselamatan hidup dan kehidupan manusia. Tidak terkecuali bila pada kebanyakan manusia sifat-sifat negatif *bhuta* itu justru menguasai diri mereka, berupa sifat-sifat *rajas*, *tamas*, *sadripu* (loba/serakah/korup/kikir; *kroda*, pemaarah, tidak sabar; *mada*, sering mabuk dalam berbagai bentuk; *moha*, selalu bingung, tidak bijak, bahkan tidak lagi ingat arah tujuan yang benar; *matsarya*, irihati; serta watak-watak jahat lainnya, maka niscaya bakal menjadi merusak hidup dan kehidupan. Dalam keadaan demikian kekuatan *Pancamahabhuta* pun menjadi penghancur—dan berakhir kehancuran. Air menjadi banjir, laut menjadi ganas, bahkan *tsunami* dahsyat. Unsur pertiwi menjadi longsor, menjadi bencana yang dahsyat, memakan korban. Unsur angin menjadi badai, unsur api menciptakan kebakaran.

Bila unsur bhuwana agung (makrokosmos) sudah berubah menjadi demikian negatif, maka unsur *bhuta* dalam badan manusia (mikrokosmos) pun juga akan bereaksi negatif, sehingga semakin banyak yang kerasukan watak *sadripu* dan watak-watak jahat lain. Akibatnya, sering timbul pertengkaran, kekacauan, huru-hara, bahkan perang di sana-sini. Ringkasnya, bila unsur *bhuta* tidak bahagia (tidak *hita*), tidak tenang, atau tidak *somya*, maka *bhuta* pun akan marah. Kalau para *bhuta* sampai marah, akibatnya sungguh dahsyat, mengerikan, bahkan mungkin tidak terbayangkan. Oleh karena itu, peliharalah alam lingkungan dengan cinta kasih sebaik-baiknya, rajin-rajinlah *ngejot*, *masegeh*, mempersembahkan *caru*, sampai *tawur* secara berkala. Tradisi

Hindu Bali meyakini lebih baik berkorban binatang sesuai tingkat *bhuta*-nya, karena diyakini kelak binatang yang dikorbankan itu *kasapat* (diubah statusnya) menjadi sosok manusia.

Mengapa para *bhuta* senang *nadah* (memakan, meminum, menikmati) binatang, daging, darah, tuak, arak, berem, dan yang berbau amis, seperti bawang, jahe, dan lain-lainnya? Mengapa *tadahan* para *bhuta* itu bukan sekadar sayur atau daun-daunan, bunga, misalnya? Pertanyaan ini sama saja dengan bertanya, “Mengapa singa, harimau, buaya, ular, dan binatang buas lain juga memakan daging, darah?” Jawabannya tentu sangat mudah dan sesuai logika serta keyakinan agama, yaitu: itu sudah kehendak Tuhan Yang Mahaesa. Mungkin alam, hidup dan kehidupan ini membutuhkan keseimbangan, membutuhkan siklus lahir (*utpati*), hidup (*sthiti*), dan mati (*pralina*).

Dengan penjelasan ini mudah-mudahan bagi yang belum paham akan menjadi paham. Bahwa kalau kita selalu mempersembahkan kepada *bhuta* dengan nasi, sayur, daun-daunan, buah, bunga, maka sama halnya memberi makan singa, harimau, buaya, ular, dan binatang buas lainnya dengan nasi, daun-daun, buah, bunga. Apa yang terjadi? Mereka pasti tidak akan mau makan dalam beberapa hari, sehingga mereka menjadi sangat lapar. Kelapan ini menjadikan mereka mengamuk, lalu memakan manusia, sekalipun manusia itu adalah tuannya. Sebaliknya, bila para *bhuta* itu sudah bahagia, sudah *somya*, layaknya binatang buas yang sudah kenyang dan puas, maka sifat negatif dan destruktifnya pun sirna. Yang muncul kemudian adalah sifat-sifat positifnya. Secara filosofis (*tattwa*) dalam ajaran Hindu Bali disebutkan, setelah *somya* (tenang damai) maka *bhuta* pun kembali menjadi asalnya yang sejati, murni, yaitu Dewa. Dalam posisi *bhuta* telah berubah ke asalnya yang murni menjadi Dewa, maka persembahan yang utama adalah air, daun, buah-buahan, biji-bijian, dan bunga-bunga yang wangi dan indah.

Itu sebabnya filosofi (*tattwa*) Hindu Bali menyebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa *bhuta ya, dewa ya!* Lebih lengkap lagi: *bhuta ya, dewa ya, manusa ya*. Manusia, dalam pandangan filosofis-religius Hindu Bali, punya spektrum potensi yang sama: jatuh menjadi *bhuta* yang bersifat negatif-destruktif, merusak alam lingkungan. Bisa pula sebaliknya, meningkat menjadi Dewa yang menebarkan cinta kasih, melindungi alam lingkungan, memelihara kelangsungan dan keberlanjutan hidup dan kehidupan ini.

12. Banten

Banten menjadi salah satu unsur atau syarat penting dalam upacara Hindu Bali. Tidak mungkin ada upacara Hindu Bali dilangsungkan tanpa *banten*. Seperti halnya mantram, *banten* juga merupakan sarana komunikasi langsung penganut Hindu Bali ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan seluruh Ista Dewata, juga kepada *Kawitan* (Leluhur), bahkan juga kepada *Bhuta-Kala*.

Banten secara umum merupakan persembahan, simbol, maupun sarana penganut Hindu Bali mengungkapkan pemujaan, rasa syukur (*angayubagia*), rasa terima kasih (*suksmaning manah*), sarana doa memohon keselamatan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, kerukunan, serta permohonan-permohonan yang baik lainnya. Bahkan juga untuk menyatakan

perbuatan diri yang sering salah, menyatakan dosa, kemudian juga memohon pengampunan dan tuntunan. Dalam lontar *Yadnya Prakreti* disuratkan jelas bahwa *banten* itu merupakan wujud perlambangan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widhi (Ida Batara), alam semesta (*bhuwana agung*), serta diri manusia sendiri (*raganta tuwi*).

Karena merupakan wujud perlambangan yang demikian maka sangat wajarlah ragam, jenis, dan corak *banten* begitu sangat banyak, sesuai dengan kebutuhan atau tujuannya, juga sesuai dengan tingkat besar kecil suatu upacara (*nista-madya-utama*). Karena begitu sangat banyak ragam, jenis, dan corak *bebantenan*, maka dapat dimaklumi bila hampir tidak ada orang yang hafal dengan seluruh ragam, jenis, dan corak *bebantenan*. Pada upacara-upacara bertingkatan *madya*, apalagi *utama*, harus selalu membuka cakupan *lelutuk bebantenan*, referensi perihal *banten* menurut tradisi Hindu Bali. Karena itulah di sini Penulis tidak membahas perihal ragam, jenis, dan corak *bebantenan* itu, melainkan membatasi pembahasan khusus hanya menjawab beberapa masalah penting dan mendasar yang sangat sering menjadi pertanyaan terkait dengan *banten*. Pertanyaan-pertanyaan itu sebagai berikut.

1. Apakah semua penganut Hindu Bali harus paham/mendalami *tattwa bebantenan*?
2. Apakah benar Ida Batara tidak berkenan dengan *banten* yang sudah layu, kering, bahkan ada yang sudah membusuk?
3. Apakah ada dampak religius terhadap jual beli *banten*?

12.1 Pemahaman *Tattwa Bebantenan*

Sudah dijelaskan tadi bahwa ada sangat banyak jenis, corak, maupun ragam *bebantenan*, sehingga mungkin sulit untuk dapat menghitung mulai dari jenisnya yang sederhana, seperti *porosan*, *kawangen*, *canangsari*, sampai yang rumit semacam *banten catur*, *tawur*, dan *bebantenan karya agung utamaning utama*. Mungkin tidak ada yang hafal semua jenis *bebantenan*, walaupun ada banyak—terutama kalangan sulinggih dan cendekiawan agama—yang paham *tattwa bebantenan*.

Pertanyaannya, apakah bila *tattwa banten* yang dipersembahkan tidak dipahami, lantas berarti persembahan itu tidak diterima oleh Ida Bhatara? Tentu saja tidaklah demikian. Tidak ada keharusan semua penganut Hindu Bali paham semua *tattwa* agama ataupun *tattwa bebantenan*. Ida Sang Hyang Widhi hanya mengharuskan setiap orang supaya berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik.

Banyak orang hanya tahu ia harus tidak boleh menipu, ia tidak boleh menyakiti siapa pun, ia tidak boleh berkata kasar, ia harus menghormati orang lain, dan sebagainya. Lalu, sering sembahyang, bila *tangkil* ke pura membawa *banten pajati* atau *canangsari*, ataupun sekadar bunga, *kawangen*, dan dupa. Pengetahuan agamanya memang sangat sederhana—tidak paham lebih dalam daripada itu. Namun ketika yang bersangkutan berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dengan tulus ikhlas, atau saat yang bersangkutan *tangkil maturan* ke pura lalu sembahyang (*muspa*) dengan perasaan dan pikiran yang tulus ikhlas, *lascarya*

nekeng tuas, dengan rasa senang dan bahagia, maka pastilah perbuatan dan/atau persembahannya itu akan diberkati dengan baik oleh Ida Bhatara.

Selain itu, saat dibuat pertama kali oleh Sang Linuwih, seperti para rsi, para mpu, para pandita, semua jenis bebantenan sesungguhnya sudah disertai mantram permohonan *pasupati banten* ke hadapan Ida Bhatara. Dengan demikian, setiap orang yang mempersembahkan *banten*, mulai dari yang paling sederhana, seperti *canangsari*, *segehan*, *pajati*, sampai *banten-banten* yang rumit sekalipun, maka Ida Sang Hyang Widhi, Ida Bhatara sami, sudah memahami dan berkenan atas persembahan itu. Lebih-lebih lagi bila sudah disertai doa dan puja mantra oleh *ida sulinggih* maupun *pamangku*.

Namun demikian, bagi para cendekiawan, tokoh-tokoh agama, terlebih lagi sang *sulinggih*, tentu memang akan sangat baik paham agama, paham *bebantenan*, dan paham semua unsur-unsur pengetahuan agama. Melalui pendekatan *jnana yoga* (pendekatan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi lewat pengetahuan) memang akan sangat bermanfaat untuk menuju penyempurnaan diri sendiri, umat, maupun hidup dan kehidupan secara luas.

12.2 Ida Bhatara Menikmati Proses, Bukan Sekadar Puncak Upacara

Dalam suatu seminar di Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, tahun 1996 lalu, saat membahas topik penyederhanaan upacara, seorang sahabat dosen agama Hindu menyampaikan pernyataan supaya upacara-upacara besar Hindu Bali disederhanakan saja. “Lihatlah pada saat karya Ekadasa Rudra atau Pancawali Krama di Besakih, *canang-canang*, bunga-bunga semua sudah kering. Kelapa dan telornya membusuk. Daging ayam dan daging bebek sudah uledan (berulat). *Masak banten-banten* begitu dipersembahkan?” begitulah kira-kira pernyataannya.

Saat itu saya memberikan tanggapan sebagai berikut.

“Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara yang hadir dalam seminar ini, mestinya sudah sangat paham bahwa untuk upacara-upacara besar tentulah butuh proses persiapan dan pengerjaan yang cukup lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan untuk Ekadasa Rudra perlu persiapan setahun. Tentu dalam hal ini tidak bisa digantikan dengan waktu beberapa hari atau seminggu agar bunga-bunga, *canang-canang*, buah-buahan, dan sebagainya tetap segar. Karena dipersiapkan dalam waktu lama, maka busuk, jamur, atau *uledan* pun sering tidak bisa dihindari. Padahal, upacara Pancawali Krama, Ekadasa Rudra harus tetap dapat dilaksanakan.”

“Bapak-bapak, Ibu-ibu, Hadirin tentu juga paham bahwa Ida Sang Hyang Widhi beserta Ista Dewata Beliau semua tidaklah menikmati ataupun memberkati *yadnya* yang dilakukan itu hanya pada saat *pucak karya* atau puncak upacara. Sebaliknya, Ida Sang Hyang Widhi juga menikmati sejak awal proses hingga semua proses *yadnya*. Tuhan menikmati sejak terjadinya kemauan awal (proses pikiran) untuk ber-*yadnya*. Apakah kemauan atau niat umat-Nya itu tulus atau tidak mau ber-*yadnya*? Apakah sudah dengan pikiran yang hening suci nirmala?” papar saya saat itu.

“Proses berikutnya mungkin mulai dilanjutkan dengan proses usaha, lalu tahap pencarian, pengumpulan, hingga pengerjaan sarana *bebantenan* yang akan dipersembahkan. Ketika para lelaki *mongkod punyan nyuh* (memanjat pohon kelapa) untuk mencari *busung* (janur), *selepan* (daun kelapa), *bungkak* (kelapa muda), dan *nyuh* (kelapa), sejak saat itu juga Ida Bathara telah menikmati *yadnya* kita: pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Begitu pula ketika para wanita, ibu-ibu, gadis-gadis, mulai *majejahitan*, memasak untuk bahan tumpeng, pada saat itu juga Tuhan telah menikmati dan memberkati *yadnya*, pikiran, perkataan, dan perbuatan para wanita umat-Nya.”

Patut ditekankan di sini bahwa proses upacara dan puncak upacara itu sama penting dan sama artinya di hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Makna suatu upacara yang akan diselenggarakan itu sesungguhnya sudah mulai—dan ini justru sangat penting—pada saat proses berpikir, mulai dari hati, jiwa, kemudian bermanifestasi menjadi perkataan-perkataan, usaha-usaha, dan perbuatan-perbuatan. Semua proses ini dinikmati, dinilai, dan diberkati oleh Ida Bhatara. Sepanjang dalam proses tersebut selalu didasari oleh suasana hati, suasana kejiwaan yang *suci ning nirmala*, tulus ikhlas *lascarya nekeng tuas*. Kemudian ditambah lagi dengan perkataan-perkataan yang baik, diikuti pula oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan begitu maka *yadnya* itu niscaya dinikmati dan diberkati sebagai *yadnya* utama. Ida Bhatara tidak lagi akan melihat apakah kemudian *canang-canang* serta bunga-bunga yang telah dipersembahkan itu telah layu, bahkan telah kering atau jamur.

Jadi, untuk upacara-upacara dengan tingkatan besar, bukanlah persoalan bila saat puncak upacara (*pucak karya*) justru ada *bebantenan* yang telah kering, jamur, bahkan ada bahan-bahan yang membusuk—sepanjang prosesnya sejak paling awal sampai akhir dilaksanakan dengan pikiran, hati, jiwa, hingga perkataan dan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh tulus ikhlas, *suci ning nirmala, lascarya nekeng tuas*.

12.3 Jual Beli *Banten*

Pada zaman dahulu hingga awal dasawarsa 1970-an hampir tidak pernah terjadi ataupun sekadar terdengar terjadi jual beli *banten* di kalangan penganut Hindu Bali. Mungkin hal ini disebabkan pada saat itu penganut Hindu Bali memang tidak begitu sibuk—berbeda dengan sekarang ini, kebanyakan orang justru sangat sibuk. Selain itu, pada masa lampau semangat kegotong-royongan di kalangan masyarakat juga masih sangat hidup, kuat, sehingga segala jenis *banten* untuk upacara di semua tingkatan, selalu dikerjakan sendiri, atau bersama keluarga, bahkan dengan melibatkan para tetangga, hingga masyarakat. Semua dikerjakan dengan bergotong-royong.

Dari sudut pandang proses *yadnya*, pembuatan *banten* dengan bergotong-royong dalam suasana kebersamaan seperti itu tentu sangat baik, karena selama proses mencari bahan-bahan *banten*, *majejahitan*, memasak untuk tumpeng dan sebagainya, pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi *yadnya* yang terfokus pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta semua Ista Dewata. Proses demikian sangat bermakna bagi setiap *yadnya*.

Belakangan, karena alasan sangat sibuk dengan berbagai urusan bisnis, kerja, politik, jabatan, dan sebagainya, kebiasaan membuat *banten* sendiri, termasuk bergotong-royong menyiapkan *bebantenan* pun mulai terkikis di sana-sini. Bahkan meskipun tidak sangat sibuk, ada juga beberapa keluarga yang justru selalu “membeli” *banten*. Ini biasanya menggunakan alasan lebih praktis, lebih ekonomis, dan *pang gelis* (supaya cepat). Pentingnya proses *yadnya* tidak menjadi pertimbangan para keluarga semacam ini.

Salahkah orang atau keluarga membeli *banten*? Tentu saja tidak salah, apalagi memang benar sangat sibuk. Namun tentu kurang baik kalau dibandingkan dengan membuat sendiri, apalagi kalau dikerjakan dengan gotong royong.

Mengapa jual-beli *banten* itu kurang tepat?

Bila jual-beli *banten* tersebut dilakukan dengan sang *sulinggih*, maka proses dan tindakan ini bahkan bukan lagi sekadar tidak tepat, melainkan sudah jelas salah. Kenapa? Karena, *manut sasana kawikon*, menurut etika ke-*sulinggih*-an, sang *sulinggih* sudah jelas dan tegas *tan wenang adol atuku* (pantang bertransaksi jual-beli). Istilah yang benar manakala berhadapan dengan *sulinggih* dalam kaitan dengan *banten* adalah “*nunas*” (memohon) dan “*ngaturang*” (mempersembahkan). Maksudnya, umat *nunas* (memohon) *banten* dari sang *sulinggih*, lalu umat juga *ngaturang* (mempersembahkan) *prabea banten* dan *dana punia* kepada sang *sulinggih*. Jadi, posisi sang *sulinggih* di sini adalah membantu “*mapaica*” kepada umat, sedangkan umat “*ngaturang*” kepada sang *sulinggih*.

Bagaimana kalau jual-beli *banten* dengan *walaka*? Ini tidak salah, tetapi tetap kurang baik dibandingkan dengan dikerjakan sendiri maupun dikerjakan dengan bergotong-royong atau *matetung*, *ngoopin*, maupun *ngayah*. Jual beli *banten* akan menjadi tidak baik apabila si penjual *banten* saat-saat proses pembuatannya selalu diliputi pikiran untung rugi atau terfokus pada berapa keuntungan uang/material yang bisa diraih. Dengan berpikir demikian maka *banten* itu bisa tertular “virus” *rajasika* (sifat kenafsuan) ataupun bisa menjadi *banten* yang *tamasika* (sifat masa bodoh). Bukan *banten* yang dibuat berdasar *satwika* (sifat bijaksana).

Bagaimana dengan membeli *banten* atau *canang* dari non-Hindu? Yang ini sudah tentu sangat tidak baik, karena saat membuat *canang* itu pikiran si penjual pasti tidak tertuju kepada *yadnya*, bukan kepada Ida Bhatara. Sebaliknya, pikirannya terfokus pada keuntungan uang atau material yang didapatkan. Belum lagi proses *sukla* (bersih dan suci) tidak dijamin dalam proses pembuatan maupun bahan-bahannya. Tidak dijamin, misalnya, bahan *banten* ataupun *canang* yang dijual itu tidak menggunakan bunga bekas, kelapa bekas, dan sebagainya. Oleh karena itulah penganut Hindu Bali seyogyanya tidak pernah membeli bunga, *canang*, ataupun *banten* dari non-Hindu.

13. Hindu Bali, Adat Bali, dan Budaya Bali

Sudah tidak terbantahkan lagi, baik secara teoritis maupun secara praktis empiris, bahwa sejak dahulu sampai saat ini antara Hindu Bali, adat Bali, dan budaya Bali mempunyai hubungan kausalitas. Karena ada Hindu Bali maka kemudian terciptalah adat Bali; karena ada agama Hindu Bali kemudian terciptalah budaya Bali, sebagai budaya tradisi yang dinikmati dan dikagumi sampai saat ini. Budaya Bali tidak saja menjadi kebanggaan masyarakat Bali sendiri, tetapi telah dinikmati dan dikagumi secara nasional oleh seluruh bangsa Indonesia, bahkan juga masyarakat dunia.

Bali juga telah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Daerah-daerah lain di Indonesia dan masyarakat dunia mengagumi Bali, kemudian selalu ingin datang lagi ke Bali, bahkan ada yang ingin hidup hingga tidak jarang juga yang ingin sampai menghembuskan napas terakhirnya di Bali. Itu tiada lain karena keterkaguman mereka terhadap adat dan budaya Bali. Begitu ingat adat Bali, begitu orang menikmati budaya Bali, maka seketika itu pula orang menjadi ingat dengan Hindu Bali.

Itulah sebabnya mengapa adat Bali dan budaya Bali sangat menarik setiap hati, setiap jiwa. Itulah sebabnya mengapa adat dan budaya Bali begitu sangat kuat, sekalipun didera oleh modernisasi, industrialisasi, dan globalisasi. Adat Bali dan budaya Bali terlihat ber-*taksu*, mampu menarik hati setiap insan yang melihat dan menikmatinya, karena adat dan budaya Bali itu mempunyai spirit kuat, mempunyai roh yang membuatnya hidup, membuatnya bergerak dinamis, membuatnya menari dan membuat banyak cerita, dan bahkan legenda. Roh Bali itu tiada lain adalah Hindu Bali.

Secara teoritik maupun praktis empiris pun orang-orang sepakat dengan teori—yang sudah dapat disebut dalil—bahwa antara Hindu Bali, adat Bali, dan budaya Bali adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun dapat dibedakan. Kalau diibaratkan manusia yang hidup maka akan ada jiwa atau sukma, kemudian bagian-bagian tubuh, ada aktivitas tubuh, maka Hindu Bali adalah jiwa adat Bali, Hindu Bali-lah yang memberi hidup Budaya Bali. Dengan kata lain, tanpa Hindu Bali maka adat Bali tidak mungkin hidup. Adat Bali akan mati tanpa Hindu Bali. Demikian juga halnya kehidupan budaya Bali akan berakhir tanpa dijiwai Hindu Bali. Lebih lanjut, Pulau Bali pun tidak layak lagi disebut Bali, apalagi dinamakan Pulau Dewata, jikalau Hindu Bali tidak lagi menjadi tuan di Pulau Bali.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat Bali adalah adat yang religious. Budaya Bali adalah budaya yang religius. Hal inilah yang menyebabkan karakter adat Bali dan budaya Bali berbeda dengan adat dan budaya lain di dunia. Di daerah-daerah lain, atau bahkan di kebanyakan wilayah di belahan Bumi ini, adat dan budayanya, selain memang berbeda dengan agama yang dianut oleh masyarakatnya, juga kelihatan terpisah antara agama di satu sisi, adat di sisi lain, kemudian budaya di sisi yang lain lagi.

Berbeda halnya Bali dengan Hindu Bali, adat Bali, dan Budaya Bali. Dalil *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg memang berlaku di Bali, karena adat dan budaya Bali menyerap sepenuhnya agama Hindu Bali. Lihat saja desa adat atau desa pakraman

di Bali yang membagi habis wilayah Bali ke dalam wilayah adat Bali, adalah juga merupakan lembaga adat yang bersifat sosial religius. Ini dibuktikan dengan desa adat atau desa pakraman yang selalu meng-*empon* Pura Kahyangan Tiga Desa, Pura Kahyangan Jagat, dan *setra*. Dan, ini memang merupakan salah satu syarat untuk bisa disebut desa adat atau desa pakraman di Bali. Dari sejarahnya pun jelas bahwa desa adat atau desa pakraman di Bali didirikan untuk melaksanakan agama Hindu Bali. Dengan demikian, untuk wilayah Bali, adalah tidak mungkin dan juga tidak dipatutkan ada desa adat atau desa pakraman selain yang dijiwai oleh Hindu Bali.

Adat Jangan Menghambat Agama

Paparan tadi telah jelas menunjukkan bahwa adat Bali dijiwai oleh agama Hindu Bali, adat Bali merupakan pelaksanaan agama Hindu Bali, atau juga sebagai salah satu wujud agama Hindu Bali sehari-hari. Oleh karena itu adat Bali haruslah bisa tetap dan selalu tampak *adiluhung*, tampak sangat baik, sebagai adat yang menarik hati, adat yang mewujudkan cinta kasih, membuat selalu senang, dan membahagiakan. Ini karena, sekali lagi, adat Bali itu wujud atau manifestasi agama Hindu Bali.

Bagaimana kalau sebaliknya? Adat Bali di sana-sini terkadang memang terlihat menakutkan, terlihat beringas, terlihat tanpa cinta kasih. Dengan penampilan wajah yang seperti ini maka dengan sedih kita akan sepakat, bahwa adat yang demikian itu merupakan pencederaan terhadap agama Hindu Bali. Adat yang merusak, beringas, dan menakutkan itu adalah adat yang menistakan Hindu Bali.

Adat Bali seharusnya melancarkan perkembangan agama Hindu Bali. Adat Bali tidak boleh menghambat jalan agama Hindu Bali. Adat Bali mutlak terikat atau dibatasi oleh Hindu Bali, bukan sebaliknya, adat malahan mengikat jalan pelaksanaan Hindu Bali.

Penulis sengaja mengemukakan masalah ini karena di beberapa desa adat memang masih muncul wujud-wujud tindakan anarkis berupa keberingasan, perusakan, dan wujud-wujud yang tidak baik lain yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu Bali. Juga ditemui di beberapa desa adat atau desa pakraman yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang menghambat jalan pertumbuhan dan perkembangan Hindu Bali.

Misalnya, kesepakatan *suryak siu* atau *beriuik sapanggul* yang melarang pangabenan bagi orang yang baru meninggal, dengan alasan supaya semua dikubur terlebih dahulu, kemudian nanti akan ada *ngaben ngerit*. Padahal *ngaben/palebon* itu utama bagi agama Hindu, juga Hindu Bali. Di Bali, hanya karena alasan *dewasa ayu* (hari baik) atau ada upacara *karya* di suatu pura kahyangan, ataupun karena ketiadaan biaya, menyebabkan tidak bisa langsung dilaksanakan ngaben terhadap keluarga yang meninggal. Ada kalanya juga orang atau keluarga yang punya upacara agama, seperti ngaben, pawiwahan, sering dibebani oleh adat dengan urusan *ka teben* atau urusan yang tidak berkaitan dengan agama, seperti berapa potong babi, berapa membuat *isin sok*.

Contoh-contoh kasus demikian tentu saja sangat menghambat pelaksanaan dan perkembangan agama Hindu Bali yang baik dan benar. Kalau sudah menghambat agama, maka

dosalah yang akan didapat. Adat haruslah melancarkan pelaksanaan agama. Desa adat dan banjar adat haruslah membantu dan meringankan *krama* (warga adat), dan bukan membebani *krama* dengan urusan-urusan non-agama. Desa adat dan banjar adat haruslah paham yang mana urusan, pekerjaan, atau kewenangan desa/banjar adat, dan yang mana hak prerogatif *krama* dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dalam semua ruang lingkup *pancayadnya*. Misalnya, yang menjadi hak prerogatif *krama*, apakah mau ngaben langsung atau mengubur jenazah terlebih dahulu; apakah mau potong babi, itik, atau ayam, atau mau memberi makan atau tidak. Juga prosesi upacara, *nuur sulinggih*, pemilihan besar kecil tingkatan upacara *nista-madya-utama*, semua ini menjadi hak prerogatif *krama* yang melaksanakan upacara (*sang adruwe yadnya*).

Dalam hal-hal contoh kasus tersebut, desa/banjar adat sepatutnya hanya membantu kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan/yadnya itu. Desa/banjar adat boleh memberi saran—itu bahkan baik—tetapi tidak boleh mengintervensi dalam hal hak-hak prerogatif *krama*. Ajaran agama Hindu tidak bisa berubah, dan tidak bisa diubah. Ajaran agama Hindu itu *sanatana dharma*, Kebenaran Abadi. Namun adat (*acara*) bisa berubah-ubah, dapat selalu diperbaiki, dapat selalu diubah untuk melancarkan jalan pelaksanaan ajaran agama. Mari kita berenang maupun menyelam di lautan tradisi, namun jangan sampai tenggelam!

Budaya Bali adalah Hindu Bali

Telah dijelaskan di depan bahwa budaya Bali itu dijiwai oleh Hindu Bali. Bahkan pola dasar pembangunan Bali telah sepakat dinyatakan sebagai pembangunan yang berbudaya, berwawasan lingkungan, berdasarkan *trihita karana* dan dijiwai oleh agama Hindu Bali. Semua budaya tradisional Bali itu dijiwai oleh agama Hindu Bali. Lihatlah semua kesenian Bali, mulai dari berbagai jenis gamelan (musik), tarian, lukisan, patung, berbagai jenis makanan, hingga pakaian, dan sebagainya pada mulanya tidak ada yang bersifat komersial. Pada awalnya semua dimaksudkan sebagai persembahan atau *yadnya*.

Belakangan, setelah berkembang pariwisata, mulailah budaya Bali banyak yang berubah sifat menjadi komersial. Karena dijiwai oleh agama Hindu Bali-lah maka gamelan Bali, tari-tarian Bali, patung-patung, ukiran-ukiran Bali menjadi memukau dan ber-taksu. Demikian juga arsitektur bangunan Bali juga dijiwai oleh Hindu Bali.

Sakral dan Profan

Adat Bali dan budaya Bali, sekalipun semua bersumber dari filsafat (*tattwa*) Hindu Bali atau dijiwai oleh Hindu Bali, namun sesuai perkembangan zaman, sebagai sebuah wujud toleransi interaksi antarbudaya yang memang tidak bisa dihindari, maka pada bagian-bagian adat dan budaya Bali kemudian ada yang digolongkan sebagai yang sakral dan ada pula yang digolongkan sebagai yang profan. Adat dan budaya Bali yang sakral adalah yang secara langsung merupakan wujud ajaran agama Hindu Bali, tidak terpisahkan dan tidak dapat dibedakan dengan agama

Hindu Bali. Wujud adat Bali dan budaya Bali yang demikian adalah mutlak agama Hindu Bali atau simbol-simbol agama Hindu Bali. Misalnya:

- gambelan: *selonding*.
- tari-tarian: *rejang Dewa, baris gede, wayang gedogan, telek, topeng Sidakarya*.
- *palinggih-palinggih* (bangunan suci): semua bentuk *palinggih* mulai dari *apit lawang, panunggun karang, padmasana, meru, gedong-gedong palinggih*, dan sebagainya.
- upakara: *penjor, canang sari, gebogan*, dan semua wujud *bebantenan*.
- Patung-patung: patung-patung arca (perwujudan) Ista Dewata.
- Istilah-istilah: *OM Swastyastu, Shanti, Ida Sang Hyang Widhi, Ida Sang Hyang, Sang Hyang, Hyang, Tat twam Asi, Tirta*, dan sebagainya.
- Semua jenis dan prosesi upacara agama Hindu Bali.

Budaya Bali yang sakral merupakan wujud budaya yang mutlak sebagai simbol-simbol agama Hindu dan/atau agama Hindu Bali. Karena itu simbol-simbol agama ini tidak boleh sama sekali dipakai untuk hal-hal yang tidak ada kaitan dengan agama Hindu atau agama Hindu Bali.

Adapun adat dan budaya Bali yang bersifat profan itu adalah adat dan budaya yang sekalipun berasal dari filsafat (*tattwa*) atau ajaran Hindu Bali, namun sudah diikhlasakan menjadi adat dan budaya murni. Budaya Bali yang bersifat profan ini dapat dipakai oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam kegiatan apa saja. Hal ini bertujuan sebagai pelestarian budaya, toleransi budaya, dan penyesuaian budaya (interaksi budaya).

Misalnya:

- semua jenis gamelan selain yang disakralkan.
- semua jenis tarian selain yang disakralkan.
- patung-patung, selain patung Ista Dewata.
- arsitektur bangunan, ukir-ukiran, tembok, panyengker, candi bentar, candi kurung.
- busana adat, kecuali busana *sulinggih*.
- semua jenis makanan tradisi.

Penggolongan sakral dan profan dalam budaya Bali ini sangat diperlukan untuk dapat membedakan antara simbol-simbol agama di satu sisi, dengan adat dan budaya yang tidak mutlak sebagai simbol-simbol agama di sisi lain. Dengan demikian dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan simbol-simbol agama yang bisa menjurus kepada penistaan agama.

BAGIAN II: *SULINGGIH* HINDU BALI

1. Sejarah Pendirian Parisada
2. Parisada Itu Lembaga *Sulinggih*
3. *Sulinggih* adalah Sang *Dwijati*
4. *Sulinggih* Tidak Sama dengan Pendeta Umumnya
5. *Nuur* Lebih daripada Satu *Sulinggih*

BAGIAN II: *SULINGGIH HINDU BALI*

1. Sejarah Pendirian Parisada

Pada tanggal 26 Juni 1958 sejumlah organisasi keagamaan di Bali, setelah mengadakan rapat di Denpasar, mengajukan resolusi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Isi resolusi tersebut sebagai berikut.

1. Tetap menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mendudukan agama Hindu Bali sejajar dengan agama-agama lain dalam organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Menuntut agar diadakan perubahan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1952, yaitu agama Hindu Bali agar dimasukkan dalam Pasal III sebagai bagian.
3. Mendesak kepada Pemerintah Daerah Bali agar tetap mempertahankan Dinas Agama Otonom Daerah Bali yang dibentuk dengan Surat Keputusan DPR Daerah Bali tanggal 24 Maret 1953, No. 2/S.K./DPRD.

Resolusi itu ditandatangani oleh delapan organisasi, yaitu: Satya Hindu Dharma (I Gusti Ananda Kusuma), Yayasan Dwijendra (Ida Bagus Wayan Gede), Partai Nasional Agama Hindu Bali (Ida I Dewa Agung Oka Geg), Majelis Hinduisme (Ida Bagus Tugur), Paruman Para Pandita (Pedanda Made Kemenuh), Panti Agama Hindu Bali (I Ketut Kandia), Angkatan Muda Hindu Bali (Ida Bagus Gede Dosther), dan Eka Adnyana (Ida Bagus Gede Manuaba). Resolusi dikirim kepada Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri RI, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Ketua Parlemen, Ketua Dewan Nasional, Penguasa Perang Pusat, Penguasa Perang Daswati I Nusa Tenggara di Denpasar, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara, Kepala Daerah Bali, Ketua DPRD Bali, Anggota Parlemen RI yang berasal dari Bali, Anggota Dewan Nasional dari Bali (I Gusti Bagus Sugriwa), dan Pers.

Pada tanggal 29 Juni 1958 lima orang utusan organisasi agama dan sosial di Bali menghadap Presiden Republik Indonesia di Tampak Siring. Diantar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Bali, I Gusti Putu Merta, kelima utusan tersebut, masing-masing Ida Pedanda Made Kemenuh, I Gusti Ananda Kusuma, Ida Bagus Wayan Gede, Ida Bagus Dosther, dan I Ketut Kandia. Adapun pokok masalah yang diajukan adalah supaya dalam Kementerian Agama Republik Indonesia ada Bagian Agama Hindu Bali, sebagaimana yang telah diperoleh oleh Islam, Khatolik, dan Kristen.

Permohonan tersebut ternyata mendapat perhatian positif dan dikabulkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 5 September 1958, maka terbentuklah Bagian Agama Hindu Bali pada Kementerian Agama Republik Indonesia. I Gusti Gede Raka adalah orang pertama yang memimpin Bagian tersebut.

Pengakuan Pemerintah RI terhadap kehadiran agama Hindu di Indonesia memang terlambat datangnya. Dasawarsa 1950-an itu memang menjadi fase penting perjuangan penganut Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, untuk mendapat pengakuan dari Negara. Perjuangan tersebut pun tidak berhenti sampai pada pengakuan keberadaan agama Hindu oleh Negara saja.

Keinginan membentuk yang disebut Dewan Agama Hindu Bali atau Badan Keagamaan Hindu Bali muncul dan semakin berkembang. Keinginan tersebut tidak saja terkait dengan perjuangan tersebut di atas, namun terkait juga dengan timbulnya Undang-Undang Penghapusan Swapraja di seluruh Indonesia, dan perwujudan Propinsi Administrasi Nusa Tenggara menjadi tiga Propinsi Otonom, yaitu Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Dengan penghapusan Swapraja di Bali yang dulu rajanya sekaligus merupakan Kepala/Pimpinan Agama Hindu Bali dan juga adat Bali, maka timbul keinginan membentuk Badan Keagamaan yang dapat menggantikan peran raja tersebut.

Pada tanggal 7 Oktober 1958 di Balai Masyarakat Denpasar diadakan pertemuan kembali antara Pemerintah Daerah Bali dengan Pimpinan Organisasi Keagamaan di Bali. Keputusan pertemuan adalah membentuk Panitia yang ditugaskan untuk mempersiapkan Dewan Agama Hindu Bali. Panitia terdiri atas Paruman Para Pandita, Panti Agama Hindu Bali, Angkatan Muda Hindu Bali, Dr. Ida Bagus Made Mantra, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Pada tanggal 6 Desember 1958, Panitia yang sudah dibentuk ini lantas menyelenggarakan rapat di Pasanggrahan Bedugul. Rapat Panitia memutuskan bahwa Hindu Bali Sabha atau Pasamuhan Agung Hindu Bali—yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sidang Pembukaan Parisada Dharma Hindu Bali—diadakan pada tanggal 21, 22, dan 23 Februari 1959 bertempat di Fakultas Sastra Udayana, Denpasar.

Sidang itulah kemudian melahirkan yang dinamakan **Piagam Parisada**. Piagam Parisada ini ditandatangani oleh 28 orang, terdiri atas delapan delegasi dari Pemerintah Daerah TK II seluruh Bali, dan 12 Organisasi Keagamaan, masing-masing: Perhimpunan Buddhis Indonesia Bali Dharma Yadnya, Parta Nasional Agama Hindu Bali, Majelis Hinduisme, Wiwada Sastra Sabha Satya Hindu Dharma, Perhimpunan Hidup Ketuhanan, Angkatan Muda Hindu Bali Kumara Bhuwana, Yayasan Dwijendra, Eka Adnyana Dharma, Persatuan Keluarga Bhujangga Waisnawa, dan Paruman Para Pandita. Sidang tersebut juga menetapkan personalia Pasamuhan Para Sulinggih (11 orang), Pasamuhan Para Walaka (22 orang), dan Pengurus Harian yang terdiri atas Ketua (Ida Pedanda Wayan Sidemen), Wakil Ketua (I Gusti Bagus Oka), dan Sekretaris (Dr. Ida Bagus Mantra).

Piagam Parisada terdiri atas 12 butir menyangkut bentuk, sifat, kedudukan/tempat, fungsi, tugas, tujuan, keanggotaan, susunan Parisada, sidang, pembiayaan usaha, dan hubungan dengan pemerintah. Sesuai dengan tujuan buku ini, maka beberapa butir Piagam Parisada tersebut dicatatkan kembali di sini.

Butir kesatu menyebutkan, bentuk lembaga ini adalah **Parisada**, bersifat keagamaan Hindu Bali, berkedudukan di Bali, tempat pimpinan berada. Fungsi lembaga ini merupakan

koordinasi segala kegiatan keagamaan umat Hindu Bali, dengan tugas mengatur, memupuk, dan memperkembangkan agama Hindu Bali. Sedangkan tujuannya adalah mempertinggi kesadaran hidup keagamaan dan kemasyarakatan umat Hindu Bali. Keanggotaan terdiri dari Para *Sulinggih* dan *Walaka* yang dipandang ahli atau mempunyai pengetahuan mendalam perihal keagamaan Hindu Bali, sehingga susunan Parisada terdiri dari:

- a. Pasamuhan Para *Sulinggih*; dan
- b. Pasamuhan Para *Walaka*.

Baik Pasamuhan Para *Sulinggih* maupun Pasamuhan Para *Walaka* keduanya dengan kepaniteraan bersama. Usaha lembaga ini meliputi penelitian, pendidikan, penerangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan bahasa yang sederhana Piagam Parisada telah mengandung hal-hal yang sangat mendasar dalam kaitan dengan usaha pembinaan dan pengembangan agama Hindu. Terpancar jelas pula ada api semangat yang kuat di dalamnya (Disarikan dari *Warta Hindu Dharma*, No. 354 tahun 1996).

2. Parisada Itu Lembaga *Sulinggih*

Ida Pedanda Putra Telaga, salah seorang pendiri Parisada sekaligus mantan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat pernah menyatakan bahwa Parisada hendaknya bagaikan sebuah “cincin permata” yang melingkar di jari tangan. Permata yang bercahaya adalah “para *Sulinggih*”, sedangkan emas yang menyangga permata itu adalah “para *Walaka*”. Keduanya merupakan satu-kesatuan yang harmonis.

Secara harfiah kata *parisada* berarti “perkumpulan orang-orang suci”, atau “lembaga orang-orang suci ataupun yang disucikan”. Untuk di Indonesia, yang berorientasi kepada Hindu Bali, maka yang diakui sebagai orang-orang suci, orang-orang yang *sadhu* itu adalah para *sulinggih*. Oleh karena Parisada pada dasarnya adalah lembaga para *sulinggih* (pandita), maka sudah sepatutnya memang pucuk pimpinan Parisada dipegang oleh *sulinggih*.

Sabha Pandita adalah lembaga sakral dan tertinggi dalam PHDI, sedangkan *Sabha Walaka* berkedudukan sebagai *pangabih* atau pendamping atau pembantu, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah non-agama, seperti yang berkaitan atau berhubungan dengan kenegaraan, pemerintahan, hukum, politik, penggalan dana, pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya. Kedudukan dan pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab ini dapat diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PHDI.

3. *Sulinggih* adalah Sang *Dwijati*

Sulinggih atau *pandita* yang dimaksudkan di sini adalah *sulinggih* Hindu Bali dari keturunan mana pun dia, bagi umat Hindu Bali, adalah seorang *Brahmana Dwijati*. *Brahmana Dwijati* adalah *brahmana* yang tingkat kebrahmanaannya dicapai melalui proses

lahir dua kali (*dwijati*). Setelah memenuhi segala persyaratan dan melampaui proses *dwijati* secara Hindu Bali, maka seseorang di-*diksa* (disucimurnikan secara kerohanian atau spiritual) sebagai *sulinggih dwijati*. Itu sebabnya orang yang sudah di-*diksa* disebutkan sebagai lahir yang kedua kali. Pertama kali dia lahir dari rahim sang ibu biologis, sedangkan kelahirannya yang kedua kali ini lahir dari kemampuan, kesadaran, dan pengetahuan kerohanian sang guru *nabe* (guru spiritual). Idealnya seorang *dwijati* lahir kembali sebagai manusia suci, tanpa cacat cela, sehingga manusia suci ini termasuk ke dalam golongan *sulinggih* (orang dengan kedudukan terhormat dan sakral).

Upacara sakral *dwijati* secara Hindu Bali sebenarnya merupakan puncak perjalanan dan pendakian spiritual, dari manusia *walaka* (manusia biasa) yang tidak luput dengan cacat cela, lalu berproses menjadi *sulinggih* yang luput dan *tan keneng* (tidak terkena) cacat cela; dari manusia yang tidak suci berproses menjadi manusia suci. Proses *dwijati* tersebut bukanlah hanya pada upacara *diksa*. Upacara *diksa* itu hanya merupakan puncak proses *dwijati* yang cukup lama. Ibarat proses seseorang meraih gelar sarjana, maka acara wisuda hanyalah puncak seluruh proses selama 4-5 tahun perkuliahan.

Untuk menjadi seorang *sulinggih*, proses pendakian spiritual yang dilalui tentu saja lebih lama dan jauh lebih berat daripada proses menjadi seorang sarjana. Proses tersebut sebenarnya telah dapat diamati sejak masa *brahmacari* (remaja, semasa menuntut pelajaran), berlanjut terutama kemudian pada masa *grehasta* (berumah tangga). Sikap dan perilakunya sudah sepatutnya menunjukkan sikap perilaku seorang *walaka* yang pantas di-*diksa* menjadi *sulinggih*.

Proses *walaka* menjadi seorang sang *dwijati* dari pandangan hukum agama diartikan tidaklah sekadar perubahan dari tidak suci menjadi orang suci. Lebih daripada itu, sosok (terutama karakter) manusia *walaka*-nya telah dinyatakan tidak ada lagi atau “mati”. Karena *karma wasana* semasa *walaka*-nya telah dinyatakan “mati” (*nyeda raga*) atau tidak ada lagi, maka *sesana* (etika perilaku, tugas pokok dan fungsi) sang *walaka* pun lantas diganti dengan *sesana sang sulinggih*, yaitu *ngaloka pala sraya*.

Guna dapat menjalankan *sesana ngaloka pala sraya*, maka sang *dwijati* pun diikat oleh *brata* pokok. Ada empat *brata* pokok, yang disebut *catur bandana brata*, sang *dwijati*, yakni:

1. *amari aran* : berganti nama;
2. *amari bhusana* : berganti tingkah berbusana;
3. *amari wesa* : berganti tingkah laku;
4. *amari wisaya* : berganti kesenangan, bahkan menuju pembebasan dari ikatan keduniawian.

Dengan proses *amari aran* (kewajiban berganti nama) dan tiga *brata* lainnya itu, maka menjelmalah seorang *walaka* sebagai *sulinggih* yang telah dinyatakan suci, dalam arti *tan keneng patita* sekaligus juga *tan ceda angga*, artinya tanpa cacat cela, baik fisik maupun rohani. Termasuk juga dalam hal ini mesti telah dinyatakan bebas dari masalah-masalah hukum, baik hukum perdata maupun pidana.

Oleh karena itulah seseorang yang telah menjadi *sulinggih* tidak lagi diperbolehkan, atau tidak lagi dipatutkan mengemudi kendaraan sendiri (menyetir sendiri, menjadi sopir), misalnya. Hal ini penting guna menghindarkan sang *sulinggih* dari kemungkinan-kemungkinan masalah hukum yang sangat pelik atas terjadinya kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan akibat mengemudi kendaraan itu. Begitu pula, *sulinggih tan wenang adol-atuku* (tidak patut lagi bertransaksi jual-beli). Pantangan ini mempunyai maksud jelas bahwa sang *sulinggih* tidak boleh lagi terikat dengan urusan, apalagi pamerih, keuntungan materiil, di samping juga agar sang *sulinggih* tersebut terbebas dari masalah-masalah hukum, baik perdata maupun pidana, sebagai akibat yang mungkin timbul dari urusan jual-beli tersebut.

Sesana dan syarat-syarat ke-*sulinggih*-an tersebut patut dijalani dan dijalankan dengan *rajeg* (taat dan ketat asas) sesuai dengan *uger-uger kawikon* oleh sang *sulinggih*. Hal ini mutlak karena dari pandangan hukum agama Hindu, seorang *sulinggih* harus selalu dinyatakan jujur oleh *walaka*, harus selalu dinyatakan benar oleh *walaka*. Tidaklah diperbolehkan atau tidaklah dipatutkan seorang *walaka* menyatakan seorang *sulinggih* itu tidak benar, tidak baik, terlebih lagi dinyatakan berbohong. Yang berhak menyatakan seorang *sulinggih* itu tidak benar, tidak baik, atau bahkan berbohong itu hanyalah sang *Nabe* (sang Guru Spiritual). Bila sang *Nabe* telah *lepas* atau *lebar* (wafat), maka penilaian itu dapat dilakukan oleh *Paruman Sulinggih*. Hanya para *sulinggih* itulah yang berhak dan berwenang mem-*patita* (menjatuhkan sanksi) kepada seorang *sulinggih*.

4. *Sulinggih* Tidak Sama dengan Pendeta Umumnya

Tanpa mengurangi rasa hormat dengan para pendeta dari agama selain Hindu Bali, dapatlah dinyatakan di sini bahwa *sulinggih* menurut Hindu Bali memang tidaklah identik dengan *pendeta* pada umumnya, ataupun pemimpin-pemimpin agama pada umumnya. Begitu juga—sebagai ilustrasi lain—konsep *setra* dalam masyarakat Hindu Bali tidaklah identik dengan *kuburan* pada umumnya. Memang mesti diakui bahwa dalam beberapa hal konsep dan filsafat agama Hindu Bali memang berbeda dengan agama lain, walaupun tujuan setiap agama mungkin sama. Logikanya mudah sekali: kalau memang harus sama satu dengan lain, maka tidaklah perlu ada banyak agama. Tuhan telah menciptakan banyak jalan dan banyak cara menuju kepada-Nya.

Begitulah adanya, konsep utuh *sulinggih* dalam Hindu Bali, misalnya, memang berbeda dengan pendeta pada umumnya. *Sulinggih*, sesuai dengan proses *dwijati* yang sakral, bagi penganut Hindu Bali adalah sosok yang sangat mulia, yang tidak terbatas pada dihormati, dimuliakan, dan dipatuhi saja, tetapi juga disucikan. Disucikan di sini diartikan bahwa penganut Hindu Bali wajib menjaga kesucian *sulinggih*-nya, baik *sakala* (jasmani) maupun *niskala* (rahani). Untuk itu penganut Hindu Bali wajib menjaga *sulinggih*-nya agar tidak terkena *leteh* (kekotoran) maupun *ujar ala* (kata-kata kotor: disalahkan, dicaci-maki, diumpat, atau dituduh yang tidak baik).

Untuk maksud dan tujuan tetap menjaga kesucian itulah maka seorang *sulinggih* dalam etika Hindu Bali tidaklah boleh didebat oleh *walaka*. Umat hanya boleh mendengar wacananya serta memohon petunjuk kepada *sulinggih*. Karena kedudukan dan *sesana sulinggih* yang demikian itulah maka beliau tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam masalah hukum pidana ataupun perdata, tidak dapat lagi terlibat dalam gugat-menggugat secara hukum. Apalagi hendak dijadikan tersangka, ini pasti tidak boleh! Untuk menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan itulah maka seorang *sulinggih* diwajibkan superhati-hati, superketat mengontrol diri, mematuhi ketentuan *sesana kawikon*.

Fasilitas yang berhubungan langsung dengan *sulinggih* juga haruslah memenuhi persyaratan kesucian, yaitu *sukla*, dalam arti bersih secara sakala dan niskala. Makanan, minuman, dan tempatnya haruslah *sukla*, memang diperuntukkan khusus untuk beliau. Seorang *sulinggih* tidak boleh dituntun untuk ikut makan di rumah makan, ikut acara makan prasmanan bersama, apalagi hendak diajak *magibung* (makan dengan satu wadah bersama-sama).

Sebagai sang *dwijati*, seorang *sulinggih* memang dipahami oleh penganut Hindu Bali beliau telah lahir kembali dengan lembaran hidup yang betul-betul baru. Segala wujud, status, *sesana* yang telah lalu (semasa *walaka*), serta *karma-karma wasana walaka*-nya secara hukum agama telah dianggap tidak ada lagi atau telah mati. Kini berganti dengan wujud, nama, status, *sesana*, dan karma yang baru.

Oleh karena itulah pada saat *diksa pariksa* (semacam uji kepatutan), sang *diksawan* (calon *diksa*) terlebih dahulu mesti telah dinyatakan dalam status *tan ceda angga* atau terbebas dari cacat cela, termasuk telah terbebas dan/atau bersih dari masalah-masalah hukum, baik perdata ataupun pidana. Pernyataan *tan ceda angga* ini tentu dikeluarkan setelah melalui proses *diksa pariksa* yang dibantu pelaksanaannya oleh tim *diksa pariksa*, kemudian dinyatakan oleh sang Guru Nabe dan sang Guru Waktra bersangkutan sebagai “telah bebas dari cacat cela”.

Selanjutnya, guna menghindari *ujar ala*, seseorang yang sudah di-*dwijati* semestinya juga sudah *maraga putus*: putus dengan pamerih keduniawian, menjaga dan menahan pekataan, tidak mudah berkomentar, tidak lagi aktif sebagai pengamat atau komentator. Berbuat, berkata, menulis dapat dilakukan sang *dwijati* harus bila sudah sangat diperlukan dan dengan sangat hati-hati. Untuk itu sang *dwijati* harus bisa menahan diri supaya tidak mudah berkomentar—terutama di media massa—terhadap masalah-masalah non-keagamaan. Bahkan, pada masalah keagamaan sekalipun, kalau terjadi polemik di media massa, sang *sulinggih* harus mampu menahan diri dulu. Bila sudah mentok, jalan buntu, maka barulah sang *sulinggih* berbicara. Ini penting karena ucapan sang *sulinggih* pada hakikatnya adalah “sabda” yang bersifat final dan mengikat para *walaka*. *Sulinggih* sepatutnya tidak terjebak lagi pada pengejaran popularitas—namun, sekalipun akhirnya menjadi populer, itu semata-mata karena popularitas tersebut-lah yang datang dengan sendirinya.

Peran utama sang *sulinggih* adalah *ngaloka pala sraya*—membina dan menuntun umat, serta *muput* (memimpin) upacara. Karena kedudukannya yang sedemikian terhormat itulah maka sang *dwijati* haruslah mendapatkan dukungan dan pengakuan. Dukungan dan pengakuan tersebut merupakan wujud kebutuhan umat. Ini perlu sebagai wujud bahwa sang *wiku dwijati* atau *silinggih* yang bersangkutan memang dibutuhkan oleh masyarakat (umat) untuk menjadi *sulinggih* mereka.

Dukungan pertama-tama diperlukan dari keluarga sendiri dan juga keluarga besar. Tentu akan sangat aneh jadinya apabila ada *sulinggih* yang tidak didukung dan tidak dipakai oleh keluarganya. Setelah dari keluarga sendiri dan keluarga besar, kemudian sang *wiku dwijati* harus pula mendapat dukungan dari desa pakraman atau desa adat tempat beliau tinggal. Bila sudah mendapatkan dukungan dari ketiga pihak ini (keluarga sendiri, keluarga besar, dan desa pakraman), selanjut pengakuan pun sepatutnya juga demikian. Pengakuan terhadap keberadaan dan status seorang *sulinggih* atau *wiku dwijati* juga sangat dibutuhkan baik dari keluarga sendiri, keluarga besar, lalu desa pakraman, dan akhirnya pengakuan dari Parisada.

Kedudukan dan *sesana* sang *dwijati* memang sangat sentral dan strategis dalam tatanan masyarakat Hindu Bali. Beliau sangat dihormati dan dimuliakan sekaligus selalu menjadi fokus perhatian. Kenapa? Karena *sang dwijati* itu, dalam pandangan ideal Hindu Bali, merupakan sosok panutan dalam etika berpikir, berkata, dan berbuat. Itu memang suatu kewajiban, bahkan keharusan—mengingat proses dan persyaratan seseorang untuk menjadi *dwijati* yang begitu ketat.

Konsekuensi dari kedudukan sang *sulinggih* yang sangat sentral dan strategis, sangat dihormati, dimuliakan, dan bahkan disakralkan itu, maka setiap kali dibutuhkan oleh umat, beliau haruslah di-*tuur* (dimohon kehadirannya) terlebih dahulu, kemudian di-*pendak* (dijemput), dan disertai *pangiring*. Saat di-*tuur* itu tujuannya harus jelas, apa peran sang *sulinggih* bersangkutan dalam acara atau upacara tersebut, apakah sebagai *pamuput* upacara, memberikan *dharma wacana*, atau peran dan tujuan lain yang jelas dan pantas dengan *sesana kawikon* beliau.

Oleh karena kedudukan *sulinggih* yang demikian tinggi, bahkan istimewa, maka mungkin saja malah sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Status ke-*sulinggih*-an, misalnya, mungkin saja dipakai sebagai “jalan tol” untuk menggapai kedudukan terhormat secara instan, sehingga ada kalanya tiba-tiba menjadi sang *dwijati*—meskipun tanpa dukungan keluarga sendiri, keluarga besar, maupun desa pakraman. Oleh karena itulah maka dukungan dan pengakuan dari keluarga sendiri, keluarga besar, lalu desa pakraman, dan Parisada sebagai satu-kesatuan dukungan dan pengakuan menjadi sangat esensial, bahkan mutlak, bagi calon *dwijati* dalam tatanan masyarakat Hindu Bali.

Demikian juga halnya saat *diksa pariksa* oleh Parisada (anggotanya juga para *dwijati*), serta disaksikan oleh keluarga besar, desa pakraman, dan masyarakat luas, hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh menggalih hal-hal dan syarat-syarat

esensial yang secara material harus dipenuhi. Bukan malah dianggap sekadar formalitas. Ini sangat penting ditekankan, karena secara sosial adalah keharusan bagi sang *dwijati*, *pandita*, atau *sulinggih* menjadi fokus, sentral, termasuk pusat perhatian dalam setiap kegiatan, terlebih lagi pada setiap upacara keagamaan. Atas alasan inilah maka Penulis tidak sepaham bila ada calon *sulinggih* yang di-*diksa* secara massal. Setiap calon *sulinggih* sepatutnya di-*diksa* khusus hanya untuk sepasang saja, yaitu pasangan suami-istri, atau sendiri saja (apabila sudah tidak lagi atau memang tidak berpasangan). Upacaranya hendaknya didukung oleh keluarga sendiri, keluarga besar, dan desa pakraman.

Begitulah, kedudukan dan *sesana sulinggih* dalam masyarakat Hindu Bali itu mengikat sang *sulinggih* sekaligus juga mengikat masyarakat supaya menjaga sang *sulinggih* tidak lagi bebas dan sembarangan berbicara, menulis, bertindak, atau berbuat. Hal ini sungguh sangat wajar bagi setiap kedudukan terhormat dan mulia. Dari pihak *sulinggih*, hobi atau kesengan saat masih *walaka* mesti ditinggalkan. Misalnya, kesenangan jalan-jalan, potret-memotret, makan-makan, atau minum-minum, menjadi komentator di media massa, pengamat aktif, mengendarai kendaraan sendiri, dan lain-lain, walaupun ada di antaranya tidak salah, namun tetap tidak pantas atau tidak etis lagi dilaksanakan setelah menjadi *sulinggih*. Sebaliknya, pihak masyarakat pun wajib memperlakukan sang *sulinggih* sebagai orang suci atau yang disucikan, dengan menghormati dan memuliakan para *sulinggih* sepatutnya.

Inilah beberapa hal penting yang patut diperhatikan oleh para *sulinggih* maupun segenap penganut Hindu Bali, agar para *sulinggih* tetap menjadi sosok sentral yang paling dihormati, dimuliakan, *mataksu*, dan disakralkan dalam kehidupan beragama.

5. *Tri Sadaka* dan *Sarwa Sadaka*

Sekitar tahun 1996 di Bali terjadi polemik tentang *tri sadaka* dan *sarwa sadaka*. Polemik ini telanjur terjadi, walaupun seharusnya tidak perlu terjadi. *Tri Sadaka* adalah *gegelaran sadaka* (istilah lain untuk sang *dwijati*, *wiku*, *pandita*, atau *sulinggih*) yang terdiri dari tiga *gegelaran* yang sudah menjadi pakem agama Hindu Bali dalam *muput* upacara. Ketiga *gegelaran* tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Gegelaran Siwa*, dilaksanakan oleh para *sulinggih* yang beraliran Siwa Siddhanta.
2. *Gegelaran Boddha* atau *Buddha*, dilaksanakan oleh para *sulinggih* yang beraliran Boddha.
3. *Gegelaran Bhujangga*, dilaksanakan oleh para *sulinggih* yang beraliran Bhujangga Waisnawa.

Ketiga *gegelaran* ini sangat diperlukan dalam *muput* (menyelesaikan) upacara besar, seperti upacara yang berkategori *tawur*, baik *Tawur Kasanga*, *Tawur Ngenteg Linggih*, *Tawur Panca Wali Krama*, sampai *Tawur Eka Dasa Rudra*. Upacara dengan upacara *Tawur* di Bali lazim disebut *karya*.

Puja, *stuti*, *stawa*, maupun *stotra* dan doa-doa ketiga *gegelaran* ini akan bertemu, menyatu, dan saling melengkapi dalam setiap upacara dalam tingkatan *karya*, sehingga semua tujuan mengadakan upacara besar tersebut dapat tercapai—dalam bahasa Bali lazim diistilahkan dengan “*sidha karya, labdha karya, sidha sidhaning don*”.

Adapun istilah *sarwa sadaka* baru dimunculkan sekitar tahun 1996 itu. Istilah *sarwa sadaka* ini menggambarkan seluruh (*sarwa*) *sadaka* (*dwijati, wiku, pandita*, atau *sulinggih*) yang ada, tanpa memandang *gegelaran* maupun asal klen atau *soroh*-nya. *Sarwa sadaka* mencakup pengertian semua *sulinggih* yang ada, sehingga lebih bersifat kebersamaan sosial. Istilah *sarwa sadaka* ini tidak ada kaitan dengan penyelesaian upacara.

Meskipun demikian tetap dapat ditangkap maksud baik pencetus istilah *sarwa sadaka* ini: bahwa pada saat-saat upacara besar, *tri sadaka* yang *muput* sebaiknya berasal dari keberagaman *sulinggih* yang ada, yaitu keberagaman klen/*soroh*-nya. Istilah *tri sadaka* dalam upacara besar tidak berarti hanya terdiri dari tiga *sulinggih*, melainkan bisa melibatkan tiga, empat, lima, tujuh, sembilan, atau sebelas *sulinggih*, dan seterusnya, sesuai kebutuhan dan keadaan. Misalnya, dari sebelas *sulinggih* yang *muput*—tetap terdiri dari tiga *gegelaran tri sadaka*—bisa saja terdiri atas tujuh *sulinggih* Siwa, dua *sulinggih* Boddha, dan dua *sulinggih* Bhujangga Waisnawa.

Namun, perlu diingat bahwa menentukan (*nuur*) *sulinggih* itu ditentukan oleh sang penyelenggara *karya* (upacara). Jadi, itu terserah sepenuhnya kepada sang penyelenggara *karya* mau *nuur sulinggih* mana atau siapa dari *gegelaran tri sadaka* di antara *sarwa sadaka* yang ada.

Dengan demikian, antara *tri sadaka* dan *sarwa sadaka* memang merupakan istilah yang berbeda, mempunyai arti berbeda pula, tetapi tidak saling bertentangan. Pemilihan *tri sadaka* di antara *sarwa sadaka* dapat berjalan sejalan, tergantung kehendak sang penyelenggara upacara.

6. *Nuur* Lebih daripada Satu *Sulinggih*

Kenapa sampai perlu *nuur* lebih daripada satu *sulinggih* untuk *muput* upacara? Tidakkah itu berlebihan? Bukankah itu pemborosan? Begitu pertanyaan sering dilontarkan belakangan ini. Dalam pemahaman Penulis, hal ini perlu dijelaskan lebih mendalam supaya tidak menimbulkan salah pengertian terhadap pelaksanaan upacara Hindu Bali.

Nuur lebih daripada satu *sulinggih* untuk *muput* upacara dalam pelaksanaan upacara Hindu Bali tidaklah berlebihan, apalagi pemborosan. Tidak pula mengada-ada. Maksud dan tujuan *nuur* (mengundang) lebih daripada satu *sulinggih* dalam kegiatan upacara, terutama upacara yang berkategori besar, seperti menggunakan banten *catur, tawur*, itu dapat dipahami sebagai berikut.

1. Untuk memperlengkap puja-mantra (baik *tri sadaka* ataupun hanya Siwa dan Boddha).
2. Untuk kesempurnaan puja-mantra. Dalam upacara-upacara besar, supaya memperoleh kesempurnaan hasil yang diharapkan sesuai filsafat upacara tersebut, maka perlu upaya kesempurnaan puja mantra. Jangan sampai terjadi *banten* besar, upacara besar, namun kurang puja mantra. Antara besarnya upacara dan *banten* haruslah sesuai dengan puja-mantra. Karena dalam upacara-upacara besar sangat dibutuhkan puja mantra yang sangat

banyak, lengkap, dan tentunya lebih lama, maka guna melengkapi kemungkinan satu *sulinggih* lupa atau salah ucap, kehadiran *sulinggih* lain sebagai penyempurna puja mantra tersebut menjadi sangat diperlukan. Dengan demikian di antara *sulinggih* yang di-*tuur* lebih daripada satu itu akan saling melengkapi puja mantra.

3. Sebagai jaminan pasti ada *sulinggih* yang *muput* dalam *gegelaran* tertentu. Ada upacara-upacara yang memang kategorinya harus di-*puput* oleh *sulinggih*. Tidak bisa dialihkan kepada pamangku saja. Misalnya, upacara *ngaroras/mamukur*, tidak akan selesai bila tidak di-*puput* oleh selain *sulinggih*. Ini berarti upacara tersebut akan batal kalau satu-satunya *sulinggih* yang di-*tuur* pada hari H tiba-tiba saja berhalangan. Itu berarti tidak ada *sulinggih* lain lagi yang *muput*, karena tidaklah etis, bahkan tidaklah mungkin, *nuur sulinggih* secara mendadak, tanpa *nuur* sebelumnya.

Guna mengatasi kemungkinan yang tidak diinginkan itulah maka untuk upacara-upacara tertentu atau kategori besar di Bali lazim *nuur* lebih daripada satu *sulinggih*—dari satu *sulinggih* yang dipersyaratkan. Misalnya, di-*tuur*-lah dua *sulinggih* Siwa—walaupun satu *sulinggih* saja sudah cukup.

Berbeda halnya dengan upacara biasa, seperti *ngodalin*, *otonan*, dan upacara-upacara yang kategori kecil. Bila sang *sulinggih* yang di-*tuur* tiba-tiba berhalangan pada hari H, upacara bersangkutan tetap saja bisa dilangsungkan karena sang *sulinggih* bisa digantikan dengan *nunas tirta* dari beliau, atau cukup di-*antebang* oleh *pamangku*.

Tentu tidak demikian halnya dengan upacara *ngaroras/mamukur* yang mesti di-*puput* langsung oleh *sulinggih*. Tidak bisa hanya dengan *nunas tirta* dari *sulinggih*, atau dipimpin oleh *pamangku*. Upacara ini dengan sendirinya akan batal apabila sang *sulinggih* tiba-tiba berhalangan. Jadi, sungguh sangat berisiko apabila dalam upacara *ngaroras/mamukur*, misalnya, *nuur* hanya satu *sulinggih*. *Ngaroras* atau *mamukur* ini merupakan serangkaian “upacara doa”: doa oleh penyelenggara, doa oleh *bebantenan*, dan doa oleh sang *sulinggih* melalui puja mantra beliau. Karena sangat ditentukan oleh puja mantra, maka perlu upaya kesempurnaan puja mantra. Di sinilah sangat dibutuhkan *nuur* lebih daripada satu *sulinggih* dalam satu saat dan satu tempat upacara yang sama. Para *sulinggih* yang di-*tuur* untuk *muput* satu upacara bersama-sama itu akan saling melengkapi dan memperkuat puja-mantra dan doa yang di-*uncar*-kan atau dilantunkan.

BAGIAN III: MENJAWAB MASALAH AKTUAL

1. Masalah Pembacaan Doa
2. Mantram Menjadi Lagu Pop
3. Hindu Bali dan Alkohol
4. Bersih – Sehat – *Sukla*
5. *Krama Yadnya*
6. *Mula Keto*

BAGIAN III: MENJAWAB MASALAH AKTUAL

1. Masalah Pembacaan Doa

Dalam berbagai acara resmi, terutama yang dilaksanakan oleh Pemerintah, akan selalu didahului ataupun diikuti dengan acara berdoa. Namun dalam agenda acara, doa ini selalu ditulis dengan “Pembacaan Doa”, bukan “Penyampaian Doa” atau “Pelantunan Doa”. Ini tentu bukan sekadar peristilahan, melainkan konsep yang sangat prinsip.

Bila disebutkan dengan kalimat “Penyampaian Doa” atau “Pelantunan Doa”, maka petugas yang menyampaikan doa tentu saja seorang rohaniwan—untuk Hindu Bali paling tidak seseorang yang sudah *mawinten*. Namun, karena secara resmi memang disebutkan dengan kalimat “Pembacaan Doa”, maka petugas doa pun memang membaca semua rangkaian doa yang sudah ditulis. Bahkan sampai mantram-mantram sakral yang seharusnya dihafalkan (dalam bahasa Bali dinamakan *rambang*) dan dicamkan itu pun akhirnya dibaca. Karena membaca, maka kedua tangan si petugas doa itu pun sering terlihat memegang teks doa yang dibaca.

Di sini tergelar adegan yang lucu: mata sang pemimpin doa tidak terpejam karena sibuk membaca, dan sikap tangannya pun menjadi tidak patut untuk sikap berdoa sesuai etika Hindu Bali. Semestinya sikap tangannya *amusti karana*, namun yang terjadi kedua tangan si pembaca doa itu justru sibuk memegang map yang berisi teks doa. Padahal, audiens yang hadir dalam acara itu tampak berdoa begitu khidmat dengan mata terpejam dan tangan *amusti karana*.

Saya bisa pastikan fenomena demikian sering terjadi, karena memang disebutkan “Pembacaan Doa”. Saya sendiri tidak *sreg* mengikuti si pemimpin “Pembacaan Doa”. Saya selalu melirik terlebih dahulu kepada si pemimpin “Pembacaan Doa”, sebelum akhirnya saya berdoa dengan cara saya sendiri.

Sebenarnya sudah sering model pembacaan doa yang demikian dipertanyakan oleh kalangan tokoh agama. “Kenapa doa *kok* dibaca?” begitu kerap pertanyaan muncul. Di berbagai kesempatan saya juga telah menyampaikan saran agar doa jangan dibaca, melainkan disampaikan, dipanjatkan, atau dilantunkan. Kenyataannya penyelenggara acara di pemerintahan tetap saja mencatumkan agenda acara pembacaan doa. Bukan memanjatkan atau melantunkan doa.

Dalam etika dan pakem Hindu Bali, doa haruslah disampaikan, dipanjatkan, atau dilantunkan. Doa, terutama mantram-mantram suci harus dilafalkan dan dihafalkan, di-*rambang*, di luar kepala sebelum berdoa, sebelum *nguncarang* mantram-mantram suci tersebut. Maknanya juga harus dipahami, diresapi, dan dicamkan mendalam. Jadi, tidak boleh dibaca! Adapun sikap tangan haruslah *amusti karana*, menyatu di dada, di hulu hati, atau di *ulun angen*. Boleh juga

dengan kedua belah jari tangan dicakupkan (*cakuping kara kalih*), seperti menyembah, namun ujung jari cakupan tangan harus di atas kepala.

Dalam etika dan pakem Hindu Bali, sloka-sloka suci ada yang harus dibaca (*putru* atau *mamutru*), ada pula tidak boleh dibacakan, melainkan harus dilafalkan atau dihafal di luar kepala. Sloka-sloka suci dari mantram-mantram atau puja-mantram haruslah dilantunkan dengan dilafal, dan harus dihafal di luar kepala. Sedangkan yang dibaca (*putru* atau *mamutru*) itu berlaku untuk filsafat-filsafat suci yang harus dibaca atau di-*putru* sebagai penyempurna upacara. Misalnya, *Putru Pasaji* dan *Putru Jaratkaru* saat upacara *ngaroras/mamukur*, atau *Putru Tawur* (*Putru Saji Pangundang Bhuta*) saat upacara *tawur*.

Mengapa doa, lebih-lebih lagi *nguncarang* mantram, tidak boleh dibacakan?

Doa, apalagi memakai mantram-mantram suci, adalah permohonan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta segenap Ista Dewata. Doa itu komunikasi langsung antara yang menyampaikan (umat-Nya) dengan Tuhan Yang Mahakuasa. Berkomunikasi antara sesama manusia saja ada etika dan pakemnya, apalagi berkomunikasi dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Berkomunikasi dengan Tuhan tidaklah mudah dan tidak boleh dilaksanakan dengan sembarangan—itu kalau ingin doa yang disampaikan diperhatikan oleh Tuhan dan Ista Dewata. Berkomunikasi dengan Tuhan dan Ista Dewata membutuhkan fokus, konsentrasi, sehingga pikiran, perasaan, dan jiwa kita menyatu terpusat kepada Tuhan dan Ista Dewata. Konsentrasi pikiran, perasaan, dan jiwa tidaklah mudah, walaupun tidak terlalu sulit, namun tetap memerlukan niat yang bulat, utuh. Oleh karena itulah dalam berdoa mata patut terpejam.

Hindu Bali mengenal ajaran *tri pramana* yang meliputi *sabda*, *bayu*, dan *idep* atau perkataan, pikiran/perasaan, dan tenaga/energi/gerak. Pada saat berdoa, lebih-lebih saat *nguncarang* mantram, maka *sabda*, *bayu*, dan *idep* ini harus menyatu—di Bali hal ini sering disebut dengan istilah “*manunggaling tri pramana*” atau “*manunggaling sabda, bayu, kalawan idep*”. Tangan dengan sikap *amusti karana* di dada (*ulun angen*) juga adalah wujud “*manunggaling sabda, bayu, kalawan idep*”, bersatunya perkataan, perbuatan, dan pikiran. Kalau mata tidak terpejam, apalagi sambil melihat teks doa dan membaca teks itu, tentu tidak akan pernah terjadi “*manunggaling sabda, bayu, kalawan idep*”. Dengan begitu doa yang dibaca tidak akan sampai, karena Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Ista Dewata tidak berkenan.

Mengapa Tuhan tidak berkenan? Karena tidak ada kesungguhan niat.

Ada lagi hal lucu yang ditemui saat menghadiri suatu acara. Dalam agenda acaranya terdapat “Penyampaian Puja Tri Sandhya”. Yang lucu itu, si pemimpin Tri Sandhya justru ada di tempat Panitia, memegang *microphone*, duduk dengan sikap duduk santai. Tangannya yang tidak sedang memegang *microphone* juga terlihat santai, lalu ia dengan santai *nguncarang* Puja Tri Sandhya yang di dalamnya ada *Gayatri Mantram* yang sangat suci.

Nguncarang Puja Tri Sandhya dengan santai, seperti *makidung* saja, tentu tidak benar. Pemimpin pemujaan Tri Sandhya haruslah duduk dengan sikap yang patut, tangan *amusti karana* menggenggam bunga, mata terpejam. *Sabda*, *bayu*, dan *idep manunggal*.

2. Mantram Menjadi Lagu Pop

Sering dijumpai dan didengar di warung-warung, di deretan pedagang kaki lima, hingga di penjual kaset/CD, *Gayatri Mantram* yang sangat sakral itu diperdengarkan secara terus menerus dengan irama lagu pop.

Dulu, saat Dirjen Bimas Hindu-Budha Departemen Agama RI dijabat oleh Dr. Drs. I Wayan Suarjaya, MSi, saya pernah menghadiri undangan Pergelaran Musik di Gedung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Pecatu, Badung. Pergelaran Musik tersebut memang sangat baik, musisi dan penyanyinya hebat-hebat, didukung oleh musisi dan penyanyi kelas nasional. Saya duduk di deretan depan, di samping Dirjen. Saya mengikuti acara itu sampai benar-benar selesai. Di samping karena kebiasaan saya mengikuti acara sampai selesai, pagelaran dan acaranya itu juga sungguh sangat menarik.

Meskipun demikian, ada satu hal yang mengusik pikiran saya seketika itu. Tatkala ada sebuah lagu pop yang syair dan lagunya sangat bagus, dinyanyikan juga dengan sangat bagus, tetapi—sayang—*Gayatri Mantram* yang sangat sakral itu masuk menjadi bagian syair lagu tersebut. Saya pun langsung berbisik kepada Dirjen Bimas Hindu-Budha, bahwa itu tidak tepat. Saya sarankan agar sloka-sloka suci mantram, terlebih lagi *Gayatri Mantram*, tidak dijadikan lagu pop ataupun menjadi bagian lagu pop.

Dirjen Bimas Hindu-Budha pun menerima masukan saya. Demikian juga saat acara selesai, saya tidak langsung pulang. Saya memanggil adik saya yang juga seorang musisi ternama, gitaris kondang I Dewa Gede Bujana. Saran saya sama juga. Kalau filsafat-filsafat agama akan menjadi sangat baik disosialisasikan melalui lagu-lagu pop, atau menjadi bagian syair lagu-lagu pop. Itu karena memang filsafat (*tattwa*) agama harus disosialisasikan. Misalnya: *Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha, Catur Purusa Artha, Sad Ripu, Sapta Timira, Sad Atatayi, Wasudewa Kothum Bakham*, dan sebagainya. Ini tentu akan sangat baik disosialisasikan melalui lagu-lagu pop.

Tentu sangat berbeda halnya dengan mantram-mantram atau puja mantram, seperti mantram Tri Sandya, Surya Raditya, Ista Dewata, OM-kara, Dwi Aksara, Tri Aksara, Panca Aksara, Dasa Aksara. Begitu juga dengan mantram *Panuur, Panyapa, Tuntunan, Panganteb*, dan semua mantram lainnya. Mantram-mantram sejenis itu tentu tidak boleh dijadikan lagu pop atau menjadi bagian lagu pop.

Mantram harus diucapkan langsung oleh seseorang dalam posisi, sikap, dan keadaan tertentu. Mantram tidak boleh diperdengarkan hanya dengan memutar kaset, atau rekaman lain, apalagi di toko-toko, di warung-warung, di kaki lima. Ini adalah etika dan pakem Hindu Bali. Mantram itu sakral. Karena sakral, maka saat diperdengarkan akan menimbulkan getaran jiwa, menimbulkan *taksu*. Karena sakral dan ber-*taksu*, maka mantram tidak boleh diperdengarkan atau diucapkan secara bebas, sembarangan.

Etika dan pakem nguncarang mantram atau puja mantram meliputi:

1. waktu, kapan?
2. sikap, bagaimana?
3. tujuan, apa?
4. orang yang mengucapkan, siapa?

Sebagai analogi, coba bayangkan kalau seorang raja, presiden, atau mungkin seorang gubernur, atau mungkin juga seorang *sulinggih* yang keluar jalan-jalan bebas sembarangan, setiap hari nongkrong di warung kopi, ikut *ngerumpi* dengan masyarakat di sana. Tentu saja tanpa protokoler. Apakah masih akan terlihat kewibawaannya, apa masih akan terlihat *taksunya*? Kalau pejabat, atau *sulinggih* saja, harus diatur atau diikat dengan protokoler, bagaimana halnya dengan mantram suci? Tentu mutlak ada aturannya, mutlak ada etika dan pakemnya juga, bukan? Kapan *nguncarang Gayatri Mantram*, kapan *nguncarang* sampai 11 kali, atau 108 kali, atau terus-menerus dalam satu hari atau satu malam—ini semua tentu ada ketentuan etika dan pakemnya yang jelas dan ketat.

Kapan dan siapa yang boleh *nguncarang* mantram Dwi Aksara (ANG-AH), kapan dan siapa yang sudah patut *nguncarang* Dasa Aksara (SANG, BANG, TANG, ANG, ING, NANG, MANG, SING, WANG, YANG)? Semua itu ada aturannya. Oleh karena itu di kalangan Hindu Bali dikenal istilah *aywa wera*—artinya, “Jangan mengambil itu” kalau belum waktunya, kalau belum pantas.

Sama halnya dengan *patanganan*. Kapan, siapa, dan untuk apa *patanganan* itu diperagakan, semua ada ketentuan etika dan pakemnya. Hanya *sulinggih* yang boleh melaksanakan *patanganan*—itu pun pada saat upacara, dalam tahapan puja tertentu pula. Jangan sampai para *walaka* atau *pamangku/pinandita* memperagakan *patanganan* saat *nguncarang* puja mantra. Itu dan begitulah Hindu Bali.

3. Hindu Bali dan Alkohol

Ada beberapa alasan topik Hindu Bali dan alkohol ini dibahas.

1. Karena alkohol selalu dibutuhkan dalam setiap upacara *bhuta yadnya*.
2. Karena minuman beralkohol, terutama tuak, arak, dan berem selalu dibutuhkan dalam setiap acara *matabuh*—yang berarti menuangkan untuk persembahan kepada para bhuta. Ini dilakukan pada setiap acara/upacara *masegeh*.
3. Karena minuman beralkohol, terutama tuak, arak, dan berem, termasuk kandungan alkoholnya sering bermanfaat untuk *usadha* atau obat. Hal ini termuat dalam beberapa lontar *Usadha* Hindu Bali.
4. Banyak bahan makanan, daun-daunan, dan buah-buahan yang mengandung alcohol.
5. Di sisi lain Hindu Bali mencegah dan melarang “kemabukan”, yang salah satu penyebabnya adalah karena minum minuman beralkohol. Ajaran agama Hindu mencegah dan melarang “kemabukan” atau “mabuk”, yang juga dianggap musuh, sebagaimana tersurat dalam ajaran sad ripu (enam musuh) dan sapta timira (tujuh macam kegelapan atau kemabukan).

Yang tergolong ke dalam *sad ripu*, yaitu:

1. *kama*, berarti hawa nafsu.
2. *lobha*, tamak, kikir, rakus.
3. *kroda*, marah atau kemarahan.
4. *moha*, kebingungan.
5. *mada*, mabuk atau kemabukan.
6. *matsarya*, iri hati.

Yang tergolong ke dalam *sapta timira*, yaitu:

1. *surupa*, mabuk ketampanan, kecantikan.
2. *dana*, mabuk kekayaan.
3. *guna*, mabuk kepandaian.
4. *kulina*, mabuk kebangsawanan.
5. *yuwana*, mabuk keremajaan.
6. *sura*, mabuk keberanian.
7. *kasuran*, mabuk kemenangan.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa mabuk atau kemabukan itu merupakan musuh, sesuai ajaran *sad ripu*, sedangkan kemabukan tidak saja disebabkan oleh minuman keras (beralkohol), namun juga disebabkan oleh *sapta timira* sebagaimana dipaparkan di atas.

Dari semua uraian di atas, alkohol atau minuman keras yang beralkohol terutama tuak, arak, dan berem, dalam ajaran Hindu Bali, berada di antara “dibutuhkan dan dijauhi”. Dibutuhkan dan dijauhi adalah satu kalimat yang penuh semangat atau jiwa religius karena akhirnya pengendalian-lah, baik pengendalian individu maupun pengendalian oleh pemerintah, yang diperlukan. Pengendalian atau pengendalian diri membutuhkan suatu kebijakan, suatu *wiwaka* atau pikiran dan pertimbangan yang utuh dan komprehensif, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang tepat atau bijak.

Dalam agama Hindu Bali, tidak pernah ada yang melarang “alkohol”, bahkan alkohol atau minuman keras tertentu sangat dibutuhkan baik untuk upacara maupun *usadha* atau pengobatan. Hindu Bali tidak melarang penyebab kemabukannya (minuman keras) atau penyebab kemabukan lain, seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan, kepandaian, kebangsawanan, keremajaan, keberanian, atau kemenangan. Logikanya, adalah tidak mungkin melarang semua itu, karena hal-hal itu juga sangat dibutuhkan untuk hidup dan kehidupan.

Selaras dengan itu ada ajaran Hindu Bali yang disebut *amerta matemahan wisya*—artinya makanan/minuman bisa menjadi *amerta* (bermanfaat untuk hidup), atau sebaliknya dapat juga menjadi *wisya* (racun), kalau salah dalam jumlah dan cara memakan dan meminumnya. Setiap makanan dan minuman, terlebih lagi obat atau vitamin, tidak akan bebas dari hukum *amerta matemahan wisya* ini. Ajaran-ajaran ini merupakan ajaran-ajaran filsafat pengendalian diri. Filsafat pengendalian diri itu merupakan salah satu inti ajaran agama.

Jadi, khusus untuk Bali, yang menjadi tanah asal agama dan penganut Hindu Bali, pengaturan tentang alkohol ataupun minuman keras, terlebih-lebih untuk tuak, arak, dan berem,

harus dilaksanakan dengan formula yang tepat dan bijak. Bukan melarang, tapi mengendalikan, itulah yang paling tepat dilakukan.

4. Bersih - Sehat - *Sukla*

Tidak sama halnya dengan umat lain yang pada umumnya hanya mengenal syarat “bersih dan sehat” saja, atau bagi umat Muslim ada tambahan syarat *halal* bagi setiap makanan khususnya, atau pekerjaan. Penganut Hindu, khususnya Hindu Bali, dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan adat, budaya, maupun lingkungan agama, mengenal syarat “bersih, sehat, dan sukla”. Jadi, di sini ada syarat tambahan berupa “sukla”. Dalam hal-hal tertentu, seperti makanan, minuman, tempat makan/minum, dan sarana upacara dan upacara, syarat *sukla* itu justru menjadi syarat mutlak atau wajib. Syarat *sukla* tidak dapat dilanggar maupun ditawarkan. Dengan demikian syarat *sukla* itu justru jauh lebih penting daripada sekadar bersih dan sehat.

Sukla adalah suatu keadaan tempat, sarana, ataupun makanan-minuman yang tidak dicemari oleh perilaku “ceroboh” atau dicemari oleh keadaan *leteh* (tercemar) karena tidak dipergunakan atau tidak diperlakukan sesuai dengan syarat, fungsi, dan tujuannya. Misalnya, *cedok* (gayung air) di kamar mandi/wc dipakai atau dicampur jadi satu digunakan di dapur, ember tempat mencuci pakaian sehari-hari dipakai juga untuk mencuci beras atau bahan-bahan makanan. Bunga, buah, dan makanan yang sudah *lungsuran* (bekas dipersembahkan), atau sisa setelah dimakan/diminum malah dipakai lagi untuk persembahan. Ini, menurut ketentuan Hindu Bali, jelas tidak dipatutkan, karena itu tergolong *leteh*—dan dengan sendirinya tidak memenuhi syarat *sukla*.

5. *Krama Yadnya*

Krama yadnya yang dimaksudkan di sini adalah ber-*yadnya* dengan lebih terarah, yaitu ber-*yadnya* kepada *krama* sekaligus melalui *krama*. Caranya: dengan memprioritaskan arah *yadnya* kita masing-masing kepada sesama *krama* Hindu Bali.

Krama yadnya mempunyai makna dan tujuan penting dalam kelangsungan kehidupan agama Hindu Bali, yaitu:

1. membantu dengan memberi keuntungan kepada sesama umat Hindu Bali.
2. secara tidak langsung sudah berarti ber-*yadnya* (*maturan*) kepada segenap Ista Dewata Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena umat Hindu Bali tempat kita berbelanja pasti akan *maturan* atau ber-*yadnya* ke sejumlah pura. Itu berarti keuntungan yang kita berikan kepada sesama *krama* kita akan sampai kepada Ida Batara-Batari Ista Dewata Hyang Widhi Wasa.
3. sebagai sarana sosial menyejahterakan sesama *krama* Hindu Bali, mengentaskan kemiskinan di kalangan umat.
4. sebagai strategi pembertahanan dan penguatan sesama umat Hindu Bali.

5. sebagai strategi mengajegkan atau melestarikan Hindu Bali agar tetap menjadi Tuan Rumah di Bali.
6. sangat religius dan sejalan dengan konsep *sukla*, yaitu makanan dan minuman sesuatu yang tidak tercemar atau *leteh*.

Krama Yadnya dapat dijalankan atau diamalkan dengan cara yang amat sederhana dan mudah, yaitu prioritaskanlah berbelanja kepada sesama *krama* Bali, sehingga dapat memberi keuntungan kepada sesama *krama* Hindu Bali pula.

6. *Mula Keto*

Belakangan juga banyak muncul protes atau kritik terhadap pernyataan atau jawaban “*mula keto*” atau “memang sudah demikian adanya”. Banyak orang saat ditanya, karena kurang pengetahuan, terlebih lagi yang tidak berlatar belakang intelektual, lantas yang bersangkutan selalu menjawab, “*Mula keto*,” atau “*Anak mula keto*.”

Penulis pun pada kasus-kasus tertentu, atau pada bagian-bagian akhir pertanyaan yang tidak bisa lagi dijelaskan atau dilogikakan—dan memang penulis juga tidak tahu lagi harus menjawab bagaimana—tanpa segan pada akhirnya juga memberika jawaban, “*Anak mula keto*.”

Jawaban “*mula keto*” atau “*anak mula keto*” memang bisa menjadi jawaban yang tepat, tapi bisa juga tidak tepat. Hal ini tergantung pada materi yang ditanyakan. Misalnya, kalau saya ditanya, “Mengapa ada matahari?” atau ditanya, “Mengapa ada Tuhan?” atau ditanya yang lain, “Mengapa ada 108 Ista Dewata?” Jawaban yang dapat saya berikan pasti, “*Anak mula keto!*”

Dalam hal pertanyaan-pertanyaan tadi, menurut saya, jawaban “*Anak mula keto!*” di sini justru merupakan jawaban yang tepat, benar, karena sudah tidak dapat dijelaskan lagi oleh logika, termasuk oleh ilmu pengetahuan, bahkan oleh filsafat sekalipun. Jawaban paling mungkin di sini adalah “agama”, kepercayaan, atau keyakinan. Ini karena agama adalah keyakinan, karena agama pada akhirnya memang “*Mula keto!*”

Sebaliknya, jawaban “*Mula keto*” atau “*Anak mula keto*” akan menjadi tidak tepat bila pertanyaan itu sebenarnya masih bisa dijawab dengan *tattwa*, logika, ilmu pengetahuan, atau bahkan dengan filsafat. Terlebih lagi bila pertanyaan yang sebenarnya masih bisa dijawab itu ditujukan kepada seorang intelektual. Bila belum apa-apa yang bersangkutan sudah langsung menjawab dengan “*Mula keto*,” atau “*Anak mula keto!*” maka jawaban tersebut jelas merupakan jawaban yang sangat tidak tepat. Bukankah tugas para intelektual itu memang belajar, memahami tentang berbagai substansi?

Penulis juga sering mendapat pertanyaan, namun penulis tidak bisa menjawab pertanyaan itu, padahal jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya masih ada secara logika, ilmu pengetahuan, ataupun filsafat. Misalnya, jawaban itu ada dalam kitab-kitab suci, *purana-purana*, atau lontar-lontar, yang belum Penulis ketahui. Dalam kondisi seperti ini, maka Penulis akan menjawab pertanyaan itu bukan dengan “*Anak mula keto!*” Penulis akan

menjawab dengan sejujurnya, *“Ampura banget, titiang kantun tambat, ilmu pengetahuan titiang durung rawuh kantos merika. Titiang nunas tempo, jaga selehin dumun, dumogi kapanggih.”* Dalam bahasa Indonesia, itu berarti, “Mohon maaf, saya masih banyak kekurangan, pengetahuan saya belum sampai di sana. Saya minta waktu memperlajarnya dahulu, mudah-mudahan ketemu jawabannya.”

Jawaban “Mula keto,” atau “Anak mula keto!” memang tidak selalu salah, tapi bisa juga benar. Meskipun demikian, jawaban “Mula keto,” atau “Anak mula keto!” juga tidak selalu benar. Tergantung apa yang ditanyakan, siapa pula yang ditanyai.

Demikian, semoga bermanfaat.

*OM Asato Ma Satgamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mretyor Ma Amretham Gamaya
OM Shanti Shanti Shanti OM.*

TENTANG PENULIS

IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET—nama sebelum *abhiseka*, Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha, SH—dikenal sebagai aktivis dan intelektual Hindu Bali yang kerap dipilih sebagai narasumber dalam berbagai seminar di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Pemikiran-pemikirannya yang kritis, bernas, sering kali original dan cemerlang, memang banyak berkaitan dengan agama Hindu, adat, budaya, dan sosial Bali, di samping juga masalah hukum, politik, ketatanegaraan, bahkan penerbangan.

Selain tercatat sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI/Peradi), pengusaha di bidang jasa penerbangan ini juga aktif dalam berbagai organisasi profesional maupun sosial. Beberapa di antaranya: Ketua Umum Himpunan *Air Traffic Controller Indonesia* (HATCI, 1989-1994); salah seorang pendiri yang kemudian dipilih sebagai Ketua Umum Forum Pemerhati Hindu Dharma Pusat (1994-2002); Anggota Litbang Parisada Hindu Dharma Pusat (1996-2001); Anggota Lembaga Pengkajian Budaya Bali/Society for Balinese Studies (SBS, 1994-1998); salah seorang pendiri yang kemudian dipercaya sebagai *Nayaka* (Tim Ahli) dan *Patajuh Bendesa Agung* Majelis Utama Desa Pakraman Majelis Utama Desa Pekraman Bali (sejak 2004 hingga kini). Sejak tahun 2014 dipercaya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, setelah sejak 1997 aktif sebagai Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali.

Ketua Tim Seleksi Calon Komisioner KPU Bali (2003 dan 2008) ini juga tercatat sebagai Anggota Badan Koordinasi Pengamanan Bali (BKPB) sejak tahun 2006. Pendiri Yayasan Waturenggong (The Waturenggong Foundation) ini kini juga ditetapkan sebagai *Panglingsir Agung* Ksatria Dalem Treh Ida Idewa Sumretha.

Atas konsistensi kiprah dan pemikiran-pemikiran dalam bidang yang ditekuninya itulah Sanggar Dewata Indonesia lantas memilihnya sebagai penerima Penghargaan “*Lempad Prize*”. Selain *Hindu Bali* ini, tawaran pemikiran-pemikiran cerdas dan bernas Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet juga diterbitkan dalam buku *Tuntunan Muspa Hindu Bali*.